

**PEMIKIRAN POLITIK EKONOMI TAN MALAKA DAN
RELEVANSINYA DI INDONESIA**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh:

ARGO SINGGIH PRATAMA

NPM : 1431040101

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG TAHUN 1440 H / 2018**

**PEMIKIRAN POLITIK EKONOMI TAN MALAKA DAN
RERLEVANSINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh

**ARGO SINGGIH PRATAMA
NPM. 1431040101**

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**Pembimbing I : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc M.Ag
Pembimbing II : Abdul Qohar, M.Si**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Argo Singgih Pratama: Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka dan Relevansinya di Indonesia

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini yang pertama adalah bagaimana pemikiran politik ekonomi Tan Malaka, dan kemudian yang kedua bagaimana relevansi pemikiran politik ekonomi Tan Malaka di Indonesia. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian untuk menggambarkan secara sistematis atau karakteristik tentang pemikiran politik ekonomi Tan Malaka, dan relevansinya di Indonesia. Sedangkan cara yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), penelitian tentang tokoh nasionalis Tan Malaka dengan membaca buku karya-karya Tan Malaka sebagai sumber primer dan buku-buku lain yang membahas tentang pemikiran Tan Malaka sebagai sumber sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini Relevansi dan pemikiran Tan Malaka cukup jelas jika dikaitkan dengan konsep politik ekonomi hari ini, yaitu menolak kapitalisme di Indonesia. Sikap ini dibangun oleh Tan Malaka mulai dari pra kemerdekaan Indonesia yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan kemerdekaan yang mutlak untuk bangsa Indonesia dan sesuai dengan hukum internasional. Dengan begitu Indonesia mempunyai hak untuk mengambil kembali alat produksi yang telah dirampas bangsa asing dan memberikan alat produksi tersebut kepada rakyat. Dalam konsep mensejahterakan rakyat Indonesia Tan Malaka menginginkan kemerdekaan Indonesia 100%, artinya kemerdekaan Indonesia benar-benar diakui oleh negara internasional dan intervensi asing benar-benar tiada di bumi Indonesia ini. Seperti alat produksi yang dirampas oleh penjajah itu dikembalikan lagi dan rakyat Indonesia yang akan membangun kembali alat-alat produksi yang telah dirampasnya. Alat produksi disini ialah perkebunan, tambang, dan kekayaan alam lainnya. Dalam pandangan politiknya Tan Malaka menginginkan Indonesia menganut ideologi sosialisme untuk menjalankan politik ekonominya dan pada kapitalisme, karena Tan Malaka menganggap sosialisme yang pas dengan kondisi kultur dan pemikiran rakyat Indonesia. Sedangkan kapitalisme menurut Tan Malaka dianggap sebagai monopoli barat terhadap negara dunia ketiga yang dalam hal ini adalah Indonesia.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1, Bandar Lampung 35131 Telp(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PEMIKIRAN POLITIK EKONOMI TAN MALAKA DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**, disusun oleh: **ARGO SINGGIH PRATAMA**,
NPM: 1431040101, jurusan Pemikiran Politik Islam telah diujikan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Ushuludin dan Studi Agama pada hari senin, tanggal 27 Mei 2019
pukul 09.00 – 11.00 WIB, tempat: Ruang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama (Gedung Dekanat Baru Lt.3)

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

: Dr. Himyari Yusuf, M.Hum

(.....)

Sekretaris

: Angga Natalia, M.LP

(.....)

Penguji Utama

: Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

(.....)

Penguji Pendamping I : Dr.H. Arsyad Sobby Kesuma, LC.M.Ag (.....)

Penguji Pendamping II : Abdul Qohar, M.Si

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuludin dan Studi Agama

Dr.H. Arsyad Sobby Kesuma, LC.M.Ag

NIP. 195808231993031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1, Bandar Lampung 35131 Telp(0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PEMIKIRAN POLITIK EKONOMI TAN MALAKA
DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**

Nama : ARGO SINGGIH PRATAMA

NPM : 1431040101

Prodi : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Fakultas : USHULUDIN DAN STUDI AGAMA

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Asyad Sobby Kesuma, LC.M.Ag
NIP. 195808231993031001

Abdul Oohar, M.Si
NIP.197103122005011005

Mengetahui

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Nadirsah Hawari, M.A
NIP. 197406282008011013

PERNYATAAN KEASLIAN / ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Argo Singgih Pratama

NPM : 1431040101

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka dan Relevansinya di Indonesia**. Adalah sebenar-benar karya asli saya, kecuali bagian yang disebutkan sumbernya.

Apabila kemudian hari ditemukan ketidak benaran dari pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima segala sangsi yang diakibatkannya.

Bandar Lampung, 22 Februari 2019

Peneliti

Argo Singgih Pratama
NPM.1431040101

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

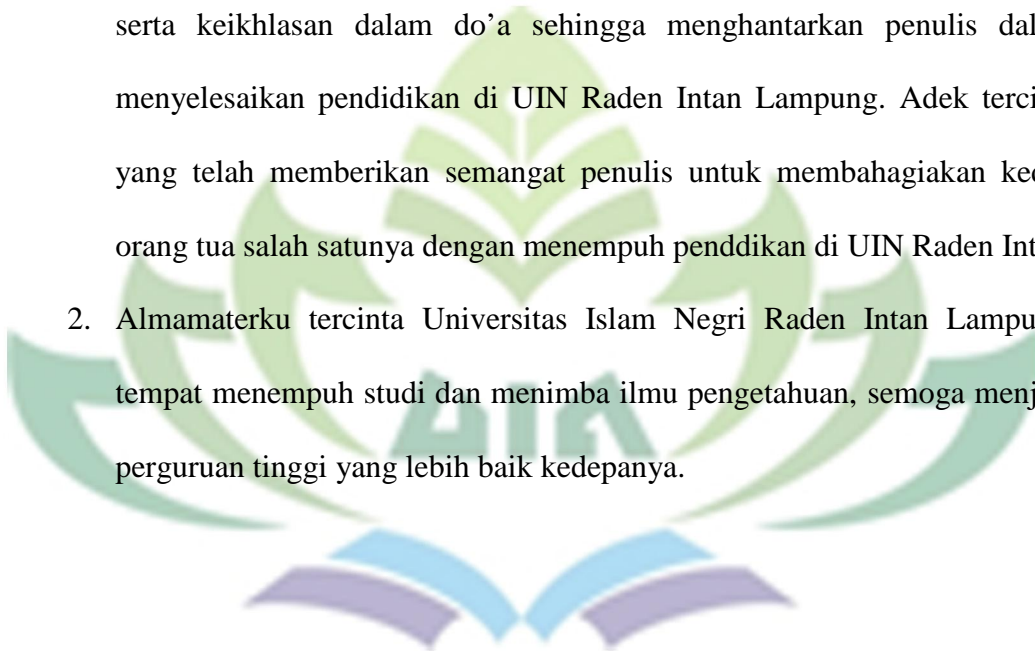
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(Qs. An-Nisa’: 58). Allah SWT memerintahkan dalam kita (dalam ayat ini) untuk mengembalikan amanat kepada ahlinya. Beberapa orang percaya bahwa yang di maksud amanat kepada manusia (yaitu harta mereka dan sesamanya) dan amanat kepada Sang Pencipta (yaitu hukum *Syar’i*). Sebagian menafsirkan bahwa amanat tersebut ialah imammah. Dan di jelaskan juga dalam riwayat yang berbunyi “kami para imam adalah yang di maksud dalam ayat in, “Allah memerintahkan Nabi SAW dan para imam as untuk mengamanatkan wilayah dankepemimpinan untuk yang berhak atasnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengamanatkan wilayah kepada amirul mukminin as, yang mengamanatkanya juga ¹

¹Ahmad Mustofa Al-Farran. *Tafsir Imam Syafi’i*, Jakarta : PT. Niaga Swadaya.2006.h 155.

PERSEMBAHAN

Dengan semangat, usaha dan do'a akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Naryono dan Ibundaku tercinta Marlikah, atas ketulusanya dalam mendidik akhlak, membesarkan jiwa, raga dan membimbing penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta keikhlasan dalam do'a sehingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Adek tercinta yang telah memberikan semangat penulis untuk membahagiakan kedua orang tua salah satunya dengan menempuh penddikan di UIN Raden Intan.
2. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga menjadi perguruan tinggi yang lebih baik kedepanya.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1996 di Desa Bina-Bumi, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang anak kesatu dari 2 saudara dari pasangan Bapak Naryono dan Ibu Marlikah.

Pendidikan pertama di TK Aisyiyah Desa Bina-Bumi, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang lulus pada tahun 2002

Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Bina-Bumi, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMP N 1 Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, yang di selesaikan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Muhamaddiyah 1 Pringsewu dan lulus pada tahun 2014.

Setelah menerima bukti kelulusan pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program strata satu (S1) Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Study Agama.

Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Belambangan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

Penulis

Argo Singgih Pratama
Npm: 1431040101

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, Ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita harapkan syafa'atnya nanti dihari akhir.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun bantuan materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag**, selakurektor UIN RadenIntan Lampung yang telahmemberikankesempatankepadapenelitiuntukmenimbailumpengetahuan di kampustercinta UIN RadenIntan Lampung.
2. Bapak **Dr. H. ArsyadSobbyKesuma, Lc, M.Ag**selaku Dosen Pembimbing I danDekanFakultasUshuluddin dan Study Agama UIN RadenIntan Lampung.
3. Bapak **Dr. NadirsyahHawari, M.A**selakuKetuaJurusanPemikiranPolitik Islam dan **Ibu Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si**, selakuSekretarisJurusanPemikiranPolitik Islam.

4. Bapak **Abdul Qohar, M.Si**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Study Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua ayahanda Naryono dan ibunda Marlikah, yang telah mencurahkan semua pikiran, tenaga, dan do'a yang tiada henti-hentinya demi mewujudkan cita-cita penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Dan adek tercinta Retno Dian Islami yang telah menjadi penyemangat penulis.
7. Keluargabesar PPI B 2014, yang telah menjadi motivator-motivator dan pembimbing penulis di kelas selama perkuliahan dari awal hingga skripsi ini selesai.
8. Sahabat-sahabat kontrakan MUGIWARA, M Andhika Nugraha, Adi Kurnia, Dani Setiawan, Abid Maulana, Aji Saputra, M Ardi Langga, Jendra Arya, Bagus Permadi, Bagus Marnos, yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi dari awal perkuliahan hingga tahap penulisan skripsi ini selesai.
9. Sahabat seperjuangan dari masa kanak-kanak hingga dewasa kini Muhammad Soleh, yang telah banyak memberikan bantuan berupa nasihat dan motivasi hingga bisa terselesaikannya skripsi ini.

10. Semuapihak yang tidak bisadisebutkannamanyasatu per satu yang telahberjasamembantubaiksecaramorilmaupunmaterildalampenyelesaians kripsi.

Penulis berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadikan pahala dan amal yang barokah serta mendapat kemudahan dari Allah SWT. Amin.

Skripsi dengan judul “Peranan Mahan Demokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Perilaku Politik Pra Pemilih Di Kota Bandar Lampung”. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Akhirnya penulis memohon Taufik dan Hidayah kepada Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin

Bandar Lampung 22Februari 2019

Penulis

Argo Singgih Pratama
Npm: 1431040101



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| PENEGASAN JUDUL..... | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| PERSEMBAHAN | |
| RIWAYAT HIDUP..... | |
| KATA PENGANTAR..... | |
| DAFTAR ISI..... | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 4 |
| C. Latar Belakang Masalah | 4 |
| D. Rumusan Masalah..... | 9 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Tinjauan Pustaka..... | 13 |
| BAB II POLITIK EKONOMI..... | 16 |
| A. Politik Ekonomi | 16 |
| B. Sistem Ekonomi Islam | 22 |
| C. Politik Ekonomi Indonesia..... | 31 |
| D. Sistem Ekonomi di Indonesia | 35 |
| BAB III TAN MALAKA DAN KARYA-KARYANYA..... | 53 |
| A. Biografi Tan Malaka | 53 |
| B. Karya-Karya Tan Malaka | 62 |
| C. Latar Belakang Pemikiran Tan Malaka | 67 |
| D. Mengenal Buku Gerilya Politik Ekonomi (Gerporlek)..... | 71 |
| E. Politik Ekonomi Internasional | 75 |
| BAB IV PEMIKIRAN POLITIK EKONOMI TAN MALAKA DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA | 85 |
| A. Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka..... | 85 |
| B. Rencana Ekonomi Tan Malaka..... | 92 |
| C. Relevansi Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka di Indonesia | 96 |
| BAB V KESIMPULAN | 100 |
| A. Kesimpulan | 100 |

| | |
|---------------------|-----|
| B. Saram-Saran..... | 102 |
|---------------------|-----|

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka dan Relevansinya di Indonesia” agar tidak terjadikesalah pemahaman dalam memahami skripsi ini terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah yang terkandung didalamnya.

Pemikiran yaitu proses, cara, perbuatan memikir, untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. Pemikiran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *inference*, yang berarti mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan.¹

Politik Ekonomi pada dasarnya istilah politik menunjuk pada setiap tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki. Sehubungan dengan itu, politik ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat. Dalam penerapannya, politik ekonomi antara satu negara dan negara yang lain tidak sama, tergantung pada sistem ekonomi yang mereka anut dan tergantung pembagian alat-alat produksi. Alat produksi yakni berupa manusia, tanah dan semua sumber daya yang akan dikelola dalam suatu negara. Karena alat produksi biasanya dengan sendirinya menguasai bagian terbesar dari

¹Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: cet 3, Balai Pustaka, 1990) hal.7

ekonomi dan perekonomian dalam suatu negara. Meskipun berbeda dalam penerapan politik ekonomi, namun tujuannya sama yaitu menciptakan kemakmuran rakyat.²

Tan Malaka adalah satu tokoh fenomenal dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang mengandung ilmu dan pesona pergerakan revolusioner. Di mata banyak kalangan khususnya kaum Marxis, lahir di Negeri Pandam Gadang, Suliki, Sumatra Barat, 2 Juli 1897, meninggal di desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun, Tan Malaka adalah monumen perjuangan yang lengkap walaupun tidak final. Dan merupakan pahlawan Nasional Indonesia.³

Relevansi secara umum adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau suatu hal yang saling berhubungan, relevansi bisa diartikan sebagai sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang, penulis, atau peneliti dalam memecahkan kebutuhan akan informasi, dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut memiliki topik yang sama atau berhubungan dengan subjek yang akan diteliti, jadi inti dari relevansi adalah kesesuaian topik.⁴

² Ismail Ekonomi Politik: *Sebuah Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Pustaka Baca 2001), hal 20

³ Taufik Adi Susilo, *Tan Malaka Biografi Singkat* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 10

⁴ Deirde Wilson, *Teori Relevansi, Komunikasi dan Kognisi*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2009) hal. 9

Indonesia adalah suatu negara yang multikultur dengan berbagai macam suku, budaya, Bahasa dan lain sebagainya yang menjadi satu kesatuan dalam satu negara⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka dan Relevansinya di Indonesia. Pemikiran politik ekonomi Tan Malaka tidak terlepas dari sistem ekonomi Sosialisme, yaitu teori politik dan ekonomi yang memperjuangkan kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau pemerintah atas alat-alat produksi dan distribusi barang. Prinsipnya, setiap warga masyarakat wajib bekerja dan mendapatkan upah sesuai prestasi kerjanya. Sistem sosialis juga merupakan sistem masyarakat atau kelompok hidup bersama tanpa hak milik pribadi atau swasta. Semuanya dikelola dari, oleh, dan untuk semua (bersama). Kondisi ini memungkinkan alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Semua kebutuhan warga negara diinventarisasi, mulai dari lahir sampai meninggal. Lalu dibuat rencana pembangunan semesta berkala berjangka pendek, menengah, dan panjang yang secara bertahap akan memenuhi kebutuhan tersebut.⁶ Di Indonesia semua itu tercakup dalam UUD 1945 pasal 33 sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia, hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti pemikiran politik ekonomi Tan Malaka dan relevansinya di Indonesia.

⁵ Siti Ansyorah, *Negara dan Konstitusi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008) hal.30

⁶ Wasid Suwanto, *Mewarisi Gagasan Tan malaka*, (Jaakarta: LPPM Tan Malaka 2006) hal. 123

B. Alasan Memilih Judul

Penulis memiliki beberapa alasan mengapa pentingnya judul ini untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Alasan Subjektif

- a. Kajian tentang Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka dan Relevansinya di Indonesia untuk memperluas pemahaman dan wawasan serta mengetahui bagaimana pemikiran Tan Malaka apakah relevan jika diterapkan di Indonesia

2. Alasan Objektif

- b. Tan Malaka merupakan seorang pahlawan pembela kemerdekaan Indonesia yang berpihak pada golongan sayap kiri, serta pencetus konsep negara Republik sebelum Indonesia merdeka⁷, yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang fenomenal hingga saat ini dan konsep pemikirannya memberikan nilai positif bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

C. Latar Belakang

Politik ekonomi merupakan kebijakan yang dijalankan untuk memperbaiki keburukan ekonomi yang sedang berlangsung. Apabila kita perhatikan dari pengertian politik ekonomi tersebut maka tujuan politik ekonomi yaitu agar kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik atau lebih meningkat. Ungkapan *Economie Politique* yang diterjemahkan dalam bahasa

⁷ Tan malaka, *Naar Dee Republik*, (Jakarta: Yayasan Massa 1925) hal 13

Inggris sebagai politik ekonomi, pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1615 dengan buku terkenal oleh *Antoine Montchrétien de: Traite de l'Economie Politique*. *Physiocrats* Prancis, Adam Smith, David Ricardo dan filsuf Jerman, dan sosial teori Karl Marx beberapa eksponen ekonomi politik.⁸

Pada tahun 1805, Thomas Malthus menjadi profesor pertama Inggris ekonomi politik, di *East India Company College, Haileybury, Hertfordshire*. Guru pertama di dunia dalam ekonomi politik didirikan pada tahun 1763 di Universitas Wina, Austria, Joseph von Sonnenfels adalah profesor tetap pertama. Di Amerika Serikat, ekonomi politik pertama adalah mengajar di College of William dan Mary, pada tahun 1784 Adam Smith *The Wealth of Nations* adalah buku teks yang dibutuhkan.⁹

Menurut Adam Smith Politik dan Ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan dari para legislator yang memiliki dua tujuan berbeda, yang pertama menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat atau mengupayakan swasembada bagi masyarakat, yang kedua yaitu menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mereka mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik.¹⁰ Sedangkan menurut Karl Marx politik dan ekonomi itu sangat kompleks, karena ia berusaha mensintesa sedemikian banyak bidang yang berpengaruh terhadap intelektual yang dipersatukannya. Disini kita hanya dapat memberikan sketsa sederhana saja mengenai pandangannya tentang ilmu ekonomi dan masyarakat, dengan rujukan khusus pada pernyataannya mengenai

⁸Irham Fahmi, *Pengantar Politik Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2000) hal.5

⁹Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hal 19

¹⁰Ibid, hal 23

kekuatan-kekuatan politik. Menurut Marx, setiap masyarakat, apapun tahap perkembangannya historisnya, berada pada landasan ekonomi. Karl Marx mempunyai pandangan yang kompleks tentang hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik. Dalam tahap vital perkembangan suatu sistem ekonomi, pengaturan politik mendukung pengaturan ekonomi dalam tahap degenerasi, kekuatan ekonomi dan politik saling bertentangan, dan konflik ini akhirnya membawa kepada kehancuran sistem politik itu dan kemudian kehancuran sistem ekonominya. Pada setiap waktu, hubungan fungsional antara kekuatan ekonomi dan politik itu bergantung pada tahap perkembangan masyarakat tersebut.¹¹

Dalam hal ini Soekarno dan Hatta meletakkan politik sebagai pembuka jalan bagi kebijakan perekonomian, jadi politik mempengaruhi proses pembangunan ekonomi, pada tahap ini seperti diterangkan Soekarno, tugas ekonomi kita adalah menghapus sisa-sisa imperialisme dan feodalisme di lapangan ekonomi. Soekarno menjelaskan Indonesia haruslah “Berdikari dalam ekonomi” mengingat bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan sumber daya, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia nya, akan tetapi kekayaan sumber daya ini belum mampu di manfaatkan oleh Indonesia untuk membangkitkan ekonomi nasional karena tingkat ketergantungan terhadap pranata ekonomi asing masih sangat tinggi. Dengan melihat realitas ini maka Soekarno pada waktu itu mengemukakan bahwa penting sekali bagi bangsa

¹¹ Frans Suseno Magnis, *Pemikiran Karl Marx* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm.11

Indonesia untuk “ Berdikari diatas kaki sendiri” dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat.¹²Terlebih lagi dewasa ini dimana segala kebijakan perekonomian tidak bisa dilepaskan dari intervensi modal asing yang menyebabkan ketergantungan bangsa ini terhadap pemodal asing yang berpotensi membuka keran kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme dalam bentuk baru.¹³

Pemikiran Mohammad Hatta tentang politik ekonomi Indonesia tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 yaitu, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

- 1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 3) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.¹⁴

Yaitu sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial, bukan kesejahteraan orang perorangan. Bahkan kekayaan alam dikuasai negara dan menempatkan BUMN secara strategis untuk mengolah nya. Namun prakteknya sejak pemerintahan orde baru berlangsung sampai saat ini

¹²Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi* (Bandung Angkasa,1965), hal. 60

¹³ Ibid,hal 66

¹⁴Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (Surabaya:rona publishing, 2016)

justro mempraktekkan sistem kapitalisme, yang jauh berbeda dengan hakikat sistem ekonomi yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33.

Keadaan perekonomian di Indonesia dewasa ini menunjukkan kurangnya pemerataan kemakmuran dan pemerataan pembangunan, disamping adanya pemusatan alat produksi pada sejumlah kelompok yang tidak merata, terdapat pula pertumbuhan investasi dan pembangunan kearah pemusatan pada sejumlah kelompok yang semakin kecil. Anantara dua masalah yaitu pemerataan kemakmuran dan pemusatan alat-alat produksi pada sejumlah kelompok, terdapat hubungan yang sangat erat, semakin kecil kelompok yang menguasai alat-alat produksi, semakin sulit mengadakan pemerataan kemakmuran, hal ini karena bagian terbesar masyarakat yang tidak memiliki alat produksi tidak akan mampu meraih hasil dari produksi.¹⁵

Tan Malaka dalam konsep ekonomi politiknya pun menolak kapitalisme di Indonesia, hal ini bertolak belakang dengan konteks ekonomi politik di Indonesia saat ini. Dimana liberalisasi ekonomi sedang berlangsung serta adopsi pemikiran barat yang secara langsung di adopsi oleh Indonesia. Ini menjadi kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia, dan mengagungkan pemilik modal dan investor asing yang semakin besar setiap tahun nya. Korban dari kebijakan ini menurut konsep Tan Malaka adalah rakyat Indonesia sendiri, dimana notabennya masyarakat Indonesia masih lemah dalam sektor

¹⁵Sarbini Sumawinata, *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)hal 163

pengetahuan dan ekonomi. Sehingga terbentuklah strata sosial di tengah masyarakat.¹⁶

Namun selama ini Tan Malaka dilihat sebagai pemimpin komunis, walaupun demikian ada sisi menarik yang sebenarnya terdapat pada diri Tan Malaka yaitu aspek nasionalnya yang selama ini kurang di eksplorasi dan di ekspos.¹⁷ sehingga kesan yang terekam dalam bena kita saat ini adalah Tan Malaka yang sangat Marxis bahkan tak jarang tudingan sebagai pemberontak, kafir, sesat yang di alamatkan sosok Tan Malaka.

Dalam hal ini penulis tidak akan mengkaji Pemikiran Tan Malaka secara umum, akan tetapi ada beberapa catatan penting yang fenomenal dan pantas untuk dikaji dan menjadi fokus dalam penelitian ini. Yaitu tentang Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka dan Relevansinya di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini kiranya dapat memberikan pemahaman dan kontribusi pemikiran yang jelas dan kongkrit bagi kita semua terutama dalam memahami perjuangan dan pemikiran Tan Malaka.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pokok bahasan yang menjadi permasalahan. Sebagaimana dalam judul penelitian yang ada, penulis ingin menerangkan pemikiran politik ekonomi Tan Malaka dalam buku (*Geoporlek*) dan relevansinya di Indonesia.

¹⁶Tan Malaka, *Rentjana Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Massa 1987) hal 33

¹⁷ Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1963 yang menyatakan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional, Pidato Presiden Soekarno

Peneliti mencantumkan dua pokok bahasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka?
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka di Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan bagaimana pemikiran politik ekonomi Tan Malaka
- b. Mendeskripsikan bagaimana relevansi pemikiran politik ekonomi Tan Malaka di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bidang keilmuan pemikiran politik islam, untuk mendalami pemikiran politik ekonomi Tan Malaka
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang pemahaman pemikiran politik ekonomi Tan Malaka

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan(*library riseach*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya, yang berkaitan dengan seorang tokoh,

yaitu studi seorang tokoh nasionalis Tan Malaka dalam bukunya Geoporlek (Gerilya Politik Ekonomi). Mengkaji pemikiran seorang Tan Malaka tentang pemikiran politik ekonominya dan relevansinya di Indonesia. Yang berarti bahwa data-data yang mendukung dalam kajian ini berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku-buku karya Tan Malaka maupun buku-buku yang membahas tentang pemikiran Tan Malaka tentang politik ekonomi.

- b. Sifat penelitian ini deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu secara aktual dan cermat, untuk mendeskriptifkan keberadaan makna yang tersirat dalam penelitian yang akan dianalisis sehingga menjabarkan bagaimana kerangka pemikiran politik ekonomi Tan Malaka dan relevansinya di Indonesia. Olehnya jenis penelitian ini lebih mudah menggunakan metode berfikir deskriptif untuk menganalisis kebenarannya.¹⁸

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu pengambilan data

¹⁸Supari Imam Asyari. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional.1981). hal. 22

diperoleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen.¹⁹ Peneliti membaca, mencatat, mengutip karya-karya Tan Malaka maupun para penulis lain yang pembahasannya mendukung penelitian ini serta menyusun data yang diperoleh menurut fokus bahasan.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penulis berdasarkan karya Tan Malaka berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pemikiran politik ekonomi Tan Malaka.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi ataupun dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi untuk memperkuat data primer. Seperti buku-buku karya para penulis yang membahas tentang pemikiran Tan Malaka.²⁰

4. Pendekatan

¹⁹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmia: Dasar Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 140

²⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (bogor, Ghalia Indonesia, 2002) hal. 85

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Metode pendekatan ini dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap suatu pemikiran Tan Malaka tentang politik ekonomi dan relevansinya di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, kemudian data-data tersebut dianalisa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Analisa deskriptif yaitu suatu proses penggambaran suatu objek secara sistematis berupa fakta atau karakteristik tertentu secara aktual dan cermat.²¹ Dalam hal ini adalah menggambarkan bagaimana karakteristik konsep pemikiran politik ekonomi Tan Malaka serta relevansinya di Indonesia.

G. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penulis atau individu yang telah mengkaji dan meneliti terhadap pemikiran Tan Malaka. Dari sejumlah tulisan yang ada itu, penulis belum mendapatkan karya membahas secara khusus tentang Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka Dan Relevansinya Di Indonesia.

1. Fitria Fajar Rotin (2016) Telaah Konsep Pemikiran Tan Malaka Dalam Politik Pendidikan Berkarakter Ke-Indonesiaan Dalam Perspektif Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya.Fakultas Tarbiyah dan

²¹ Harsojo, *Pengantar Antropologi Penelitian*, (Bandung: Bina Cipta, 1967), hal. 19

Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Karya Ilmiah ini meneliti dan menganalisis secara mendalam tentang pemikiran Tan Malaka Dalam Politik Pendidikan Berkarakter Keindonesiaan Perspektif Pendidikan Islam. Jenis penelitian ini menekankan Riset Perpustakaan (library research) dengan metode interpretasi, dan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan konsep pemikiran Tan Malaka dalam politik pendidikan berprinsip kerakyatan sebagai landasan filosofis dalam praksis pendidikan. Dalam konsep Tan Malaka bahwa pendidikan tak dapat terpisah dalam mempelajari hakekat realita yang merupakan pusat dari setiap konsep pendidikan.

2. Ian Pasaribu, Pemikiran Tan Malaka Tentang Konsep Negara, Universitas Sumatra Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Jurusan Ilmu Politik, Medan 2014. Dalam Karya Ilmian ini membahas Negara menurut Tan Malaka, penelitian ini adalah jenis penelitian tentang pemikiran tokoh, yaitu penelitian perpustakaan (library reseach), yaitu membahas tentang munculnya sebuah Negara merupakan hasil pertentangan kelas, kemudian menurut Tan Malaka agar Indonesia menjadi Negara yang baik maka Negara harus Mengakomodir kepentingan-kepentingan kelas yang ada.
3. Mario Valentino Hutabarat, Pemikiran Tan Malaka Tentang Konsep Kemerdekaan Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Medan 2016. Dalam Karya Ilmiah ini menekankan metode perpustakaan (library reseach) yang membahas tentang

tentang sosok Tan Malaka yang sesungguhnya merupakan salah seorang pemikir besar Indonesia yang mencurahkan seluruh pikiran dan hidupnya untuk cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pemikiran politik Tan Malaka lahir dari situasi obyektif penjajahan dan penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan tersebut. Dari realitas sejarah bangsa Indonesia yang telah dijajah turun temurun, Tan Malaka sangat menginginkan agar bangsa Indonesia memiliki riwayat bangsanya sendiri diluar penjajahan. Massa aksi dan revolusi sosial sebagai solusi untuk menghancurkan dominasi Imperialis Barat dan sisa-sisa feodalisme adalah syarat mutlak untuk tercapainya suatu kemerdekaan indonesia yang sepenuhnya.

4. Muhammad Afif Maulana, Islam Sebagai Gerakan Dalam Pandangan Tan Malaka, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Studi I Filsafat Agama, Yogyakarta 2016. sebuah penelitian yang menekankan riset pemikiran tokoh, kepustakaan (library reseach) Skripsi ini mefokuskan kajian penelitian pada pandangan Tan Malaka terhadap Islam sebagai gerakan, dan pandangan Tan Malaka tentang Islam sebagai gerakan pembaharuan.
5. Wahyu Ekowati Purwaningsih, Pemikiran Politik Tan Malaka Tentang Masyarakat Sosialis Untuk Mencapai Pembebasan Nasional Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintahan, Karya Ilmiah ini membahas Masyarakat sosialis menurut Tan Malaka akan bisa terbentuk jika kesadaran sejati masyarakat juga sudah terbentuk sehingga kemudian akan

menghasilkan sebuah tindakan revolusioner karena rakyat sudah mampu membaca realitas bangsa yang sesungguhnya. Dan ketika gerakan revolusioner telah terjadi maka masyarakat sosialis akan terwujud dan akan terwujud pula sebuah kehidupan yang merdeka dari ketertindasan. Pembebasan nasional juga akan terwujud sepenuhnya.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka penulis memfokuskan peneliian ini pada pemikiran politik ekonomi Tan Malaka dan relevansinya di Indonesia yang mana belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya tentang pemikiran politik ekonomi Tan Malaka dan relevansinya di Indonesia.



BAB II

POLITIK EKONOMI

A. Politik Ekonomi

Politik ekonomi adalah kebijakan yang dijalankan untuk memperbaiki keburukan ekonomi yang sedang berlangsung. Apabila kita perhatikan dari pengertian politik ekonomi tersebut maka tujuan politik ekonomi yaitu agar kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik atau lebih meningkat.²² Setiap Negara akan berbeda dalam mengambil langkah kebijaksanannya yang tujuannya adalah tetap sama yakni untuk kesejahteraan masyarakat.²³ Misalnya, untuk memperbaiki inflasi maka pemerintah atau pemegang otoritas moneter. dalam hal ini Bank Indonesia akan melaksanakan politik ekonomi yang disebut politik moneter, melaksanakan operasi pasar terbuka, dan meningkatkan cadangan umum bank-bank komersial.²⁴

Ungkapan *Economie Politique* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai politik ekonomi, pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1615

²²Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hal. 15

²³Irham Fahmi, *Pengantar Politik Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2000) hal.5

²⁴Ibid, hal 7

dengan buku terkenal oleh *Antoine Montchrétien de: Traite de l'Economie Politique*. *Physiocrats* Prancis, Adam Smith, David Ricardo dan filsuf Jerman, dan sosial teori Karl Marx beberapa eksponen ekonomi politik. Pada 1805, Thomas Malthus menjadi profesor pertama Inggris ekonomi politik, di *East India Company College, Haileybury, Hertfordshire*. Guru pertama di dunia dalam ekonomi politik didirikan pada tahun 1763 di Universitas Wina, Austria, Joseph von Sonnenfels adalah profesor tetap pertama. Di Amerika Serikat, ekonomi politik pertama adalah mengajar di College of William dan Mary, pada tahun 1784 Adam Smith *The Wealth of Nations* adalah buku teks yang dibutuhkan.²⁵

- 1) Adam Smith mengungkapkan Politik dan Ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan dari para legislator yang memiliki dua tujuan berbeda, yang pertama menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat atau mengupayakan swasembada bagi masyarakat, yang kedua yaitu menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mereka mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik²⁶.
- 2) Menurut Strailand dalam Deliarnov politik ekonomi merupakan sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Secara lebih lanjut Strailand menguraikan definisi tentang politik dan ekonomi mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling berkaitan dan bagaimana seharusnya mereka terkait.pemaknaan

²⁵Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)hal 19

²⁶Yunus Handoko, *Pemikiran Ekonomi Politik Taylor, Smith, Marx, dan Keynes*, Vol.7 Agustus 2013, hal.66

terhadap politik ekonomi tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Pada awalnya politik dan ekonomi dimaksudkan untuk memberi saran mengenai pengelolaan masalah ekonomi kepada penyelenggara negara. Politik dan ekonomi oleh pakar Politik ekonomi Baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam hal ini mereka mempelajari institusi politik sebagai keberadaan yang bersinggungan dengan keputusan politik ekonomi yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya atau masyarakat.²⁷

- 3) Martin Staniland mengemukakan pengertian ekonomi politik, Ekonomi Politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik. Hubungan interaksi tersebut bisa dinyatakan dalam banyak cara, baik itu dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lainnya dimana bersifat deterministik atau hubungannya yang bersifat timbal-balik (responitas) atau suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus.²⁸
- 4) Karl Marx berusaha mensintesakan sedemikian banyak bidang yang berpengaruh terhadap intelektual yang dipersatukannya. Disini kita hanya dapat memberikan sketsa sederhana saja mengenai pandangannya tentang ilmu ekonomi dan masyarakat, dengan rujukan khusus pada pernyataannya mengenai kekuatan-kekuatan politik. Menurut Marx, setiap masyarakat, apapun tahap perkembangannya historisnya, berada pada landasan ekonomi. Marx

²⁷ Ismah Tita Ruslin, *Relasi Politik-Ekonomi Dalam Perspektif Dependencia*, Vol 7, No 2, 2012, hal. 7

²⁸ Ibid, hal. 11

menyebut ini mode produksi dan komoditi-komoditi. Selanjutnya, mode produksi itu mempunyai 2 komponen. Pertama adalah 'kekuatan produksi,' atau pengaturan fisik dan teknologi dari kegiatan ekonomi. Kedua adalah hubungan-hubungan sosial dan produksi, atau kelengkapan mutlak manusia bahwa orang-orang itu harus berhubungan satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan ekonomi ini. Tetapi masyarakat itu bukan hanya terdiri dari struktur ekonomi saja. Berada di atasnya adalah apa yang disebut Marx sebagai struktur super" atau kompleks hukum, politik, keagamaan, estetika, dan lembaga-lembaga lainnya.²⁹ Totalitas hubungan produksi itu merupakan struktur ekonomi masyarakat. Landasan dan struktur super legal, politik, mode produksi menentukan sifat umum dari proses sosial, politik, spiritual. Marx mengungkapkan bahwa mempertahankan hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik itu bukanlah suatu kekuatan yang langgeng. Dalam kenyataannya, setiap jenis sistem ekonomi itu mengandung apa yang disebutnya 'benih-benih kehancurannya sendiri'.³⁰ Misalnya, dibawah kapitalisme, kelas borjuis yang didorong oleh persaingan untuk mempertahankan atau meningkatkan laba mereka, secara berangsur-angsur membuat para buruh semakin sengsara dan putus asa. Keadaan ini menjadi dipergawat oleh terjadinya krisis ekonomi yang semakin berat. Bagaimana tanggapan para buruh. Mula-mula mereka tetap

²⁹ Yunus Handoko, *Pemikiran Ekonomi Politik Taylor, Smith, Marx, dan Keynes*, Vol.7 Agustus 2013, hal. 70

³⁰ Frans Suseno Magnis, *Pemikiran Karl Marx* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm.7

terisolir dalam persaingan satu sama lain dan tidak terorganisir, mereka hanya sanggup mengganggu alat-alat produksi. Misalnya merusak-mesin dan serangan yang salah-jalan terhadap sistem tata-tanah feodal. Dengan demikian berkumpulnya para buruh semakin dekat satu sama lain dalam pabrik, dan gerakan industri melenyapkan perbedaan-perbedaan antara mereka. Mereka menjadi lebih dapat dikerahkan menjadi kelompok aksi kolektif, seperti halnya serikat sekerja. Mereka sekarang sanggup memaksakan pengakuan terhadap diri mereka dan mencapai beberapa kemenangan legislatif, seperti undang-undang yang membatasi lamanya jam kerja. Buruh akhirnya, mencapai tingkat kematangannya, mereka membentuk sebuah partai revolusioner yang bangkit untuk menghancurkan sistem kapitalis dan merintis suatu sistem sosialis.³¹ Karl Marx mempunyai pandangan yang kompleks tentang hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik. Dalam tahap vital perkembangan suatu sistem ekonomi, pengaturan politik mendukung pengaturan ekonomi dalam tahap degenerasi, kekuatan ekonomi dan politik saling bertentangan, dan konflik ini akhirnya membawa kepada kehancuran sistem politik itu dan kemudian kehancuran sistem ekonominya. Pada setiap waktu, hubungan fungsional antara kekuatan ekonomi dan politik itu bergantung pada tahap perkembangan masyarakat tersebut.³²

Politik dan ekonomi yang berkolaborasi kemudian kedua istilah ini menunjukkan betapa eratny keterkaitan faktor-faktor produksi, keuangan dan

³¹ David Smith, *Das Kapital Untuk Pemula*, (Jakarta: INSIST Perss, 2004) hlm 20

³² Frans Suseno Magnis, *Pemikiran Karl Marx* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm.11

perdagangan dengan kebijakan pemerintah seperti dalam dibidang moneter, fiskal dan komersial. Seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, sebenarnya terdapat motif dari ekonomi politik, yaitu bahwa di dalam kegiatan ekonomi selalu ada yang namanya motif politik yang tidak bisa di pungkiri.³³ Dilihat dari pendekatannya, politik dan ekonomi memiliki sifat yang sangat amat kental untuk memberikan pandangan bahwa politik dan ekonomi adalah satu hal yang berbeda. Ini berangkat dari pemikiran bahwa pasar dapat memperbaiki sendiri bila ada kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pasar itu sendiri. Pandangan ini menekankan bahwa ekonomi harus berdiri diluar wilayah-wilayah politik karena efektif atau tidaknya sebuah pasar itu diluar campur tangan pemerintah.³⁴ Hal ini merupakan khas pemikiran kaum klasik, namun bila dari sudut pandang bahwa ekonomi adalah perekonomian maka ekonomi membutuhkan kerangka politik dan instrument hukum di dalamnya akan terlihat adanya keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung bahwa sebuah perilaku para pelaku pasar dalam ekonomi dan ekonomi itu sendiri memiliki hal-hal yang erat kaitannya dengan politik, Hal tersebut tampak baik dalam bentuk sistemnya, budaya, kerangka teori, instrumen, lembaga-lembaga kepentingan dan lain-lain.³⁵

Keterkaitan antara politik dan ekonomi telah jelas dan gamblang karena politik dan ekonomi terutama di dunia kemodernan dan serba canggih saat

³³ Azwir Dainy Tara, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat* (Jakarta: Nuansa Madani, 2000) hlm. 30

³⁴ Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hal 19

³⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Politik Ekonomi*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2000) hal 12

ini, kedepannya hampir tidak akan ada batasan-batasan yang kuat untuk menyekat satu dengan yang lain. Seperti sistem politik saat ini yang sangat berpengaruh dalam menentukan pola konsep ekonomi yang harus dilaksanakan. Disini penekanan secara teoritis juga lahir ketika ekonomi memberikan kontribusi besar bagi adanya sistem pasar pada politik dan menggunakan politiklah sebuah sumber daya bisa didistribusikan dan dialokasikan dalam sebuah instrument-instrumen pemerintahan guna mewujudkan cita-cita tertinggi negara yang bersangkutan.³⁶

Dalam perjalanan sejarahnya, ilmu politik dan ekonomi dalam menganalisis fenomena ekonomi, menemukan bahwa unsur politik merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Meskipun politik dan ekonomi mempunyai sudut pandang berbeda dalam menganalisis masalah, akan tetapi keduanya dapat disatukan dengan pertimbangan perhatian yang sama dalam menganalisis isu-isu, mengorganisasi suatu kondisi, mengelola konflik menyediakan kebutuhan dan kepuasan bagi kebutuhan manusia serta pengalokasian beban dan keuntungan.³⁷

B. Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut. Dari kedua dasar tersebut secara

³⁶ Sjahrir, *Formasi Mikro-Makro Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1995) hlm,43

³⁷ Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada) hlm33.

konsep dan prinsip adalah tetap, tetapi pada praktiknya untuk hal-hal dan situasijuga kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes ada pula yang bisa mengalami perubahan³⁸.

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam. Dengan demikian, peraturan perundangan perekonomian Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah.³⁹

- 1) Pengertian Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai islam. Beliau mengatakan bahwa ekonomi islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran, sunnah, ijma dan qiyas.
- 2) Menurut M.M. Matewally, Pengertian Ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Alquran, Sunnah, Qiyas dan Ijma. Beliau memberikan alasan bahwa dalam ajaran islam tersebut, perilaku seseorang dan masyarakat dikendalikan ke arah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada.

³⁸ Ahmad Izzan, Syahril Tanjung, *Refrensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Quran Yang Berdimensi Islam*. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2006) hlm. 32

³⁹ Ibid. hlm 35

- 3) Pengertian Ekonomi Islam menurut Monzer Kahf adalah bagian dari ilmu ekonomi yang memiliki sifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya, yang lintas keilmuan termasuk di dalamnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, ushul fiqh.

Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah dalam semua uraiannya selalu memandang manusia secara utuh, sehingga Al-Qur'an dalam memaparkan ajarannya dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Individu dilihatnya secara utuh, fisik, akal, dan kalbu, dan masyarakat dihadapinya dengan menekankan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikan mereka dalam kelas-kelas yang saling bertentangan sebagaimana halnya komunis, namun mendorong mereka semua untuk bekerjasama guna meraih kemaslahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat atau sebaliknya⁴⁰.

Sistem ekonomi Islam lahir sebagai sistem yang mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Karena Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perorangan. Tidak pula dari sudut pandang sosialis yang ingin menghapuskan

⁴⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.10

semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Di bawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik⁴¹.

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan diantara kebutuhan dan kebutuhan etika manusia. Sistem ekonomi berfungsi atau bekerja untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki nilai. Sistem ekonomi harus tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu. Sehingga dapat diungkapkan tiga komponen penting yang menyusun eksistensinya suatu ekonomi yaitu filsafat sistem, nilai-nilai dasar sistem dan nilai instrumental sistem.⁴²

Filsafat sistem ekonomi yang Islami merupakan alternatif jalur keluar bagi ahli pikir yang memiliki sikap jujur dalam mencari kebenaran. Filsafat dari ilmu ekonomi yang paradigmanya relevan dengan nilai-nilai logik, etik dan estetik sehingga dapat difungsionalkan pada tingkah laku ekonomi manusia.

a. Tujuan Ekonomi Islam

⁴¹, Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm.25

⁴²Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), hlm.15

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahah-an, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Masalah dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki. Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain⁴³:

- 1) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- 2) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam.
- 3) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- 4) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Secara umum tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk menciptakan al-falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi

⁴³Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Media Dakwah, 1984) hlm.79

maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya agar tercipta kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.⁴⁴ Dan umat islam berserikat dalam air, api, dan padang rumput. Yang telah ditegaskan dalam hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْوَلِيُّ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعِيِّ، عَنْ جُلَيْمِ بْنِ عَنَزَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ، وَهَذَا الْقَطْعُ، عَنْ جُلَيْمِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِصَاذٍ، فِي الْكَلْبِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ: الْمُسْلِمُ يُشْرِكُ أَفْئِدَةً ثَلَاثًا: غَرَضًا، وَتَعَالِيَةً، وَثَلَاثًا: حَبَابُ الثَّيِّقِ،

Dari salah seorang Sahabat Radhiyallahu‘anhu, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi SAW, lalu aku mendengar beliau bersabda:(Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api) (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud). Hadits inidirilis oleh Imam Ahmad (38/174) dan Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam Kitab “Al-Buyu”, Bab “Fi’Man’il Mai” (3477) dari jalur Hariz ibn Utsman, dari Abu Khidasy, dari salah seorang Sahabat Muhajirin, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi sebanyak tiga kali.

- 1) Dalam Air Maksudnya adalah air yang tidak terjadi dari pencarian dan usaha seseorang, seperti air saluran pribadi, dan air sumur, serta belum dimasukkan dalam wadah, kolam atau selokan yang airnya dari sungai.

Kalau air mengalir di Babakan Pari dan Cidahu Sukabumi diserahkan

⁴⁴ Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,(Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm 39

kepada perorangan atau badan swasta, apalagi asing seperti Danone dan CocaCola, secara komersial mengeksploitasinya, itu sudah menyalahi aturan Islam.⁴⁵

- 2) Padang Rumput Maksudnya adalah semua tumbuhan atau tanaman yang basah maupun yang kering.
- 3) Dan Dalam Api Maksud dari berserikat dalam api adalah, bahwa ia tidak dilarang menyalakan lampu darinya, dan membuat penerangan dengan cahayanya, namun orang yang menyalakannya dilarang untuk mengambil bara api dirinya, sebab mengurangnya akan menyebabkan pada padamnya api.

Sungguh, masalah kepemilikan merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia, sebab ia bagian dari kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan jasmanisnya atau nalurinya tanpa memiliki sarana pemuasnya. Sehingga manusia berusaha untuk mendapatkan semua yang dibutuhkan dan diperlukannya.⁴⁶ Semua inilah yang membuat manusia bersaing untuk menguasai harta, dan bahkan mereka berjuang mati-matian demi menguasainya dan memperbanyak kepemilikannya. Oleh karena itu, Asy-Syari (pembuat hukum) datang dengan membawa hukum (ketentuan) yang mengatur

⁴⁵ Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm.50

⁴⁶ Ibid. hlm 55

penguasaan manusia terhadap harta, serta mencegah perselisihan dan setiap masalah yang mungkin terjadi sebagai akibat dari berebut untuk memilikinya.⁴⁷

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Salah satu bukti ketidak mampuan manusia membagi rezeki duniawi adalah keinginan semua manusia untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan keluarganya. Tetapi ternyata, banyak yang tidak memperoleh dambaannya, bahkan manusia durhaka tidak pernah merasa puas dengan perolehannya. Karena itu Allah yang membaginya dengan cara dan kadar yang dapat mengantar terjalinnya hubungan timbal balik antara anggota masyarakat.⁴⁸

Pada umumnya nilai-nilai Islam termasuk dalam bidang ekonomi terangkum dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.⁴⁹

1) Tauhid

Prinsip pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah tauhid. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Tauhid dapat diibaratkan sebagai matahari sebagai sumber kehidupan di bumi dan planet sekelilingnya. Tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa

⁴⁷Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Media Dakwah, 1984) hlm.45

⁴⁸Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Media Dakwah, 1984) hlm. , hlm.50

⁴⁹Ibid, hlm. 56

keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah SWT.

2) Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip ekonomi islam yang kedua ini dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan, yakni menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian dan antara pendapatan kaum yang mampu kurang mampu

3) Kehendak bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar seorang Muslim menyakini bahwa Allah Swt. memiliki kebebasan mutlak, namun manusia juga mendapatkan anugerah kebebasan untuk memilih jalan yang terbentang dihadapannya baik dan buruk. Manusia yang baik di sisi-Nya adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan. Setiap orang dapat menikmati kebebasan sepenuhnya untuk berbuat sesuatu atau mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia sukai

4) Tanggung Jawab

Menurut Islam, bahwa sungguh manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang

akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggungjawab. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan. Ada dua aspek dari konsep ini yang harus dicatat sejak awal. Pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukkan dengan 'pemaksaan' yang ditolak sepenuhnya oleh Islam.⁵⁰

C. Politik Ekonomi Indonesia

Sejak krisis pada tahun 1997, maka semua orang menyadari betapa terkaitnya masalah-masalah ekonomi dengan politik, bagaimana kejatuhan Suharto sangat terkait erat dengan kejatuhan ekonomi Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi bahkan menjadi minus dan utang negara meroket 2,5 kali lipat hanya dalam 2 tahun. dan situasi ekonominya tidak membaik -baik terutama karena situasi politiknya yang serba tidak pasti⁵¹. Secara awam orang kini mengerti hubungan ekonomi dengan politik. Bahkan kini para ekonom ortodoks mulai menyadari keterbatasan akan ilmu ekonominya dan mulai memasukkan faktor politik kedalamnya. Tidak bisa lagi hanya dengan mengutak-atik instrument

⁵⁰ Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm.59

⁵¹ Syafarudin Usman dan Isnawati, *Neoliberalisme Mengguncang Indonesia* (Jakarta: Pustaka Narasi, 2009) hlm.22

ekonomi makro, moneter, dan fiskal, tetapi harus juga mengutak-atik masalah demokrasi, penegakan HAM atau pelembagaan politik.⁵²

Meskipun sistem ekonomi di Indonesia adalah kerakyatan, gotong royong (Pancasila), namun dalam prakteknya mempunyai kecenderungan kearah sistem ekonomi kapitalis, yang meliberalisasikan seluruh sumber daya ekonomi yang ada. Pada orde reformasi ini, kepentingan pasar sangat dominan atas segala arah kebijakan dan ukuran keberhasilannya sehingga masyarakat senagai subyek dalam hal ini dikajidan objek ekonomi belaka.⁵³ Dalam hal ini wacana praktis pasar bebas menjadi dominan dalam pengaturan sumber daya perekonomian yang ada, sebagai fenomena sosial, ekonomi, politik, dan globalisasi mempengaruhi sistem yang ada pada suatu negara. Pasar uang dan modal berpengaruh terhadap sistem negara yang menyebabkan terbentuknya arah kebijakan pemerintah, dan neoliberalisme sebagai nafas sangat merasuk kedalam konstitusi Indonesia, negara dapat melepaskan asset-asetnya supaya keseimbangan pasar terjadi. Dan sistem ekonomi kapitalis yang mewarnai orde reformasi ini.⁵⁴

Akan tetapi sesungguhnya pendekatan politik ekonomi jauh lebih dalam dari pada hanya hubungan antara politik dan ekonomi maupun penataan

⁵²Azwir Dainy Tara, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2000) hal. 20

⁵³Syafarudin Usman dan Isnawati, *Neoliberalisme Mengguncang Indonesia* (Jakarta: Pustaka Narasi, 2009) hlm25

⁵⁴Syafarudin Usman dan Isnawati, *Neoliberalisme Mengguncang Indonesia* (Jakarta: Pustaka Narasi, 2009) hlm 27

kelembagaan dan isu *good governance* dari bank dunia. Politik ekonomi adalah pendekatan yang mengupas atau menganalisis pada hubungan dan pola kepentingan berbagai golongan dan kelas yang terkandung dalam berbagai proses perubahan ekonomi modern, khususnya ekonomi modal (ekonomi kapitalis).⁵⁵ Masalah perubahan dan transformasi sosial dari berbagai kelas dan golongan sepanjang sejarah terkait dengan bagaimana berlangsungnya proses penumpukan modal dan akumulasi kekayaan dimasyarakat. Hal ini yang semakin lama semakin menciptakan kesenjangan diantara berbagai golongan atau kelas di masyarakat, yaitu kaum kaya dan kaum miskin. Kaum tani dan kelompok industrialis, kelompok pekerja dan kelompok majikan. Kelas pengusaha dan kelas buruh. Ini adalah analisis politik ekonomi, yaitu keterkaitan mendalam antara hubungan kekuasaan politik dan social ekonomi.⁵⁶

Analisis politik ekonomi sangat cocok dalam menjelaskan situasi di Indonesia, dan sebenarnya juga mampu menjelaskan situasi Indonesia sebelum krisis, maupun prediksi Indonesia pasca krisis. Akan tetapi pendekatan ini bertabrakan dengan ilmu ekonomi ortodoks, yaitu ilmu ekonomi yang bersifat positivis, tidak menjelaskan kepentingan-kepentingan golongan atau kelas, mengabaikan hubungan-hubungan social ekonomi, dan hanya bicara secara agregat saja (besaran umum).⁵⁷ Doktrin ekonomi ortodoks adalah pertumbuhan ekonomi dalam mekanisme pasar bebas, tidak dipermasalahkan siapa yang

⁵⁵ Wahid, Hasyim, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, (Yogyakarta:LKSi, 1999) hlm17

⁵⁶ Ibid, hlm20

⁵⁷ Mubiyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta:LP3ES, 1998) hlm 30

tumbuh dan siapa yang dirugikan, karena mekanisme pasar bebas yang mengatur dengan sendirinya, doktrin ini semakin fundamentalis dengan menguatnya neoliberalisme, mereka adalah golongan ekonom yang percaya bahwa ekonomi pasar harus bersifat sebebaskan-bebasnya, Sebuah *free fight* liberalism (liberalisme pertarungan bebas). Liberalisme ekonomi memang akan melahirkan korban-korban dan pemenang-pemenang. Hal itu tidak menjadi soal. Ini adalah kembali ke masa awal pertumbuhan kapitalisme, yang tidak diregulasi dan dibatasi. Dan seperti pada masa itu, tumbuh pula ekonomi politik sebagai penentangannya. Jadi masa kini juga memperlihatkan bahwa ekonomi Neo Liberal akan mendapat tentangan dari pendekatan politik dan ekonomi.⁵⁸

Doktrin Neoliberalisme adalah kembali kepada prinsip “*Laissez-Faire*” (kompetisi bebas) yang ekstrim, yang menyerahkan sepenuhnya sistem perekonomian kepada kehendak dan mekanisme pasar bebas, tanpa mengindahkan konteks dan keberagaman situasi ekonomi berbagai negara, yang lebih banyak tidak siap atau tidak cocok melakukannya. Pasar bebas menjadikannya universal pengaturan ekonomi. Bahkan kalau demokrasi menghalanginya, maka lebih baik menyingkirkan demokrasi. Paham ini sekarang juga dipeluk oleh para ekonom mainstream di setiap negara, sehingga ekonom-ekonom ini justru ikut serta menggerogoti negaranya sendiri, dan menjadi corong saja dari kepentingan badan-badan multilateral.⁵⁹

⁵⁸ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal. 59

⁵⁹ Mubiyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998) hlm 30

Meskipun secara konseptual sistem ekonomi Indonesia adalah kerakyatan (Pancasila), dalam prakteknya mempunyai kecenderungan ke arah sistem ekonomi kapitalistik yang meliberalisasikan seluruh sumber daya ekonomi yang ada. Pada orde reformasi ini, kepentingan pasar sangat dominan atas segala arah kebijakan dan ukuran keberhasilannya sehingga masyarakat sebagai subyek dalam hal ini dijadikan obyek ekonomi belaka.⁶⁰

Dalam hal ini wacana praktis pasar bebas menjadi dominan dalam pengaturan sumber daya perekonomian yang ada. Sebagai suatu fenomena sosial, ekonomi, dan politik, globalisasi mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada dalam Negara. Menurut Giddens, volatilitas pasar uang dan modal berpengaruh terhadap sistem Negara dan bangsa yang menyebabkan terbentuknya arah kebijakan pemerintah. dan Neo Liberalisme sebagai nafas yang sangat masuk dalam konstitusi Indonesia sekarang yang mana dengan alasan efisiensi dan efektivitas, Negara dapat melepaskan aset-asetnya supaya keseimbangan pasar dapat terjadi. Jadi, sistem ekonomi kapitalistik sangat mewarnai orde reformasi sekarang ini.⁶¹

D. Sistem Ekonomi di Indonesia

Indonesia tidak menganut Sistem ekonomi tradisional, Sistem ekonomi komando, Sistem ekonomi pasar, maupun Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, yang di

⁶⁰ Mubiyarto, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Pusat studi Ekonomi Pancasila UGM, 2004) hlm 28

⁶¹ Revisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hal. 39

dalamnya terkandung demokrasi ekonomi maka dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi, Demokrasi Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶²

Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi adalah potensi, inisiatif, daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Negara sangat mengakui setiap upaya dan usaha warga negaranya dalam membangun perekonomian.⁶³

Adapun ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita karena bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia adalah sebagai berikut⁶⁴:

- a. Sistem *Free Fight Liberalism*, yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain.
- b. Sistem *Etatisme*, negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

⁶² Suroso, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994) hal 52

⁶³ Dr.Ir. Arif Budi Manta, *Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita*, Vol3, 2000, hal.4

⁶⁴ Ibid, hal. 55

Sistem ekonomi Indonesia dikenal sebagai Demokrasi Ekonomi adalah Sistem Ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Pada sistem ini, kegiatan produksi dilakukan oleh semua, untuk semua, dan dibawah pimpinan atau kepemilikan oleh anggota-anggota masyarakat. Motivasi kegiatan ekonominya adalah untuk kemakmuran masyarakat dengan memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan keselarasan, keserasian serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. ⁶⁵Pemikiran tokoh-tokoh ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi di Indonesia, diantaranya:

1) Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta)

Bung Hatta selain sebagai tokoh proklamator bangsa Indonesia juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sistem liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berdasarkan kekeluargaan. ⁶⁶

2) Pemikiran Wilopo

Pemikiran Wilopo disampaikan pada saat perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro tentang pasal 38 UUDS (Pasal ini identic dengan pasal 33 UUD 1945) menurut Wilopo pasal 33 memiliki arti sistem ekonomi Pancasila sangat menolak

⁶⁵Revisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hal. 27

⁶⁶ Mohammad Hatta, *Daulat Rakyat Dan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Tintamas, 1979)hal

sistem liberal, karena itu sistem ekonomi Pancasila juga menolak sektor swasta yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi liberal-kapitalistik.⁶⁷

3) Pemikiran Mubiyarto

Menurut Mubiyarto sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga sosialis. Salah satu perdebatan sistem ekonomi Pancasila dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja.⁶⁸

4) Pemikiran Emil Salim

Konsep Emil Salim tentang sistem ekonomi Pancasila sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. Menurut Emil Salim didalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar, lazimnya suatu sistem ekonomi bergantung erat pada paham ideologi suatu negara. Menegaskan bahwa yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran, lapangan-lapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain akan terus terletak dalam lingkungan swasta.⁶⁹

Meskipun sistem perekonomian Indonesia sudah cukup jelas dirumuskan oleh tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang sekaligus menjadi tokoh pemerintahan pada awal republik Indonesia berdiri, dalam perkembangannya

⁶⁷ Subianto Tjakrahardjaja dkk, *Sistem Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 68

⁶⁸ Mubiyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998) hlm. 47

⁶⁹ Emil Salim, *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Masyarakat Nasional, 1965) hlm. 35

pembicaraan tentang sistem perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada sistem ekonomi campuran, tetapi mengarah pada suatu bentuk baru yang disebut sistem ekonomi pancasila.⁷⁰ Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan pedoman bagi kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi Indonesia berbunyi “pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan.”⁷¹

Pada tahun 1960, di hadapan sejumlah pemimpin politik dan bankir di New York, Amerika Serikat, Bung Hatta mengulas gagasan politik ekonomi ala Indonesia. Ia berbicara mengenai sejumlah persoalan ekonomi yang dihadapi oleh negara Indonesia yang baru merdeka. Hatta memulainya dengan struktur ekonomi di era kolonial. Ia menggambarkan cukup sederhana, perekonomian besar di tangan orang Eropa, perdagangan menengah di tangan orang Tionghoa, India, dan Arab, sedangkan pertanian dan perusahaan kecil-kecil di tangan orang Indonesia.⁷²

Struktur itu buatan ekonomi kolonial. Dengan demikian, semakin kuat penetrasi kolonial, maka makin terdesak pula ekonomi orang Indonesia. Situasi diperparah dengan ketimpangan penduduk, juga ketimpangan pembangunan, yang dihasilkan oleh model pembangunan kolonial. Saat itu, seperti diterangkan

⁷⁰ Dr.Ir. Arif Budi Manta, *Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita*, Vol3, 2000, hal.9

⁷¹ Subiako Tjakrawerdaja dkk, *Sistem Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 23

⁷² Mohammad Hatta, *Daulat Rakyat Dan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Tintamas, 1979)hal 67

Bung Hatta, dua pertiga penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari wilayah Indonesia.⁷³

Kenyataan diatas, kata Bung Hatta, sangat mempengaruhi pandangan hidup para patriot dan pemimpin pergerakan Indonesia mengenai cita-cita Indonesia masa depan. Lahirlah cita-cita nan indah, Indonesia yang adil dan makmur, bebas dari segala ketertindasan dan kesengsaraan hidup. Indonesia masa depan, dengan alamnya yang kaya dan subur, tidak seharusnya ada kemiskinan. Indonesia merdeka harus bertolak belakang dengan kenyataan di jaman kolonial: rakyat Indonesia miskin di tengah kekayaan yang melimpah. Persis dengan kata pepatah: “Anak ayam mati di lumbung padi.”⁷⁴

jaman kolonial, seperti diterangkan Hatta, yang kaya adalah bangsa asing yang menjajah, yang mempunyai kapital dan pengetahuan teknik. Ini dipicu oleh kolonialisme dan sistem *laissez-faire*. Oleh karena itu, bagi Hatta, Indonesia merdeka harus melikuidasi kolonialisme dan sistem *laissez-faire* itu. Dalam kancah perjuangan anti-kolonial, para pemimpin pergerakan sudah merancang cita-cita perekonomian Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tidak boleh menempuh jalan kapitalisme yang terang menyengsarakan rakyat.⁷⁵

Sebaliknya, Hatta mengungkapkan, perekonomian yang membawa kemakmuran rakyat banyak ialah perekonomian yang didasarkan pada ‘pembawaan bangsa Indonesia’, yaitu semangat hidup yang dijiwai oleh cita-cita

⁷³ Ibid, hal 69

⁷⁴ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979) hal.31

⁷⁵ Mohammad Hatta, *Daulat Rakyat Dan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Tintamas, 1979)hal. 24

kolektivisme. Itu sangat nyata dalam sistem gotong royong, yakni tolong-menolong. Pembentuk perekonomian terbaik untuk masyarakat kolektivistis itu adalah koperasi. Karenanya, kata Bung Hatta, pergerakan nasional Indonesia banyak yang mengadopsi gagasan sosialisme kooperatif. Gagasan ini dijiwai tiga gagasan besar: sosialisme Eropa, gagasan Islam mengenai keadilan dan persaudaraan, dan gotong royong.⁷⁶

Gagasan diatas, begitu Indonesia sudah merdeka, segera dituangkan dalam konstitusi negara: Pasal 33 UUD 1945. Hatta menyimpulkan begini: pasal 33 ini adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Pada ayat pertama, ada ketentuan tentang dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama yang dikerjakan secara kekeluargaan: koperasi. Fahaman koperasi Indonesia, yang dibangun dari dasar gotong-royong, harus menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi harus dikembangkan sesuai tuntutan jaman. Hatta yakin, koperasi ini yang didasarkan pada self help dan auto aktivitas akan membebaskan bangsa Indonesia dari mental kolonial.⁷⁷

Selain itu, ketentuan pasal 33 UUD 1945 juga mengharuskan pembangunan ekonomi yang besar-besaran dikerjakan oleh negara. Di sini, Hatta secara tegas mengatakan, negara harus mengerjakan bukan hanya perusahaan yang mendatangkan public utility (kegunaan publik), tetapi juga cabang-cabang produksi yang penting, seperti industri pokok dan tambang. Ekonomi nasional,

⁷⁶ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979) hal.53

⁷⁷ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djilid 2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1958) hal.12

agar bisa mendatangkan kemakmuran rakyat, harus dipusatkan pada produksi primer, yang disertai dengan organisasi distribusi dan politik perhubungan yang seimbang.⁷⁸

Bung Hatta pun menyimpulkan strategi politik perekonomian Indonesia yaitu, pemerintah membangun dari atas ke bawah, sedangkan koperasi membangun dari bawah ke atas. Politik perusahaan partikular (swasta) harus disesuaikan dengan rencana ekonomi pemerintah. Seperti disinggung sebelumnya, tujuan politik perekonomian Indonesia ialah membangun suatu Indonesia yang adil dan makmur. Di sini, kata Hatta yang mengutip rencana pembangunan nasional 1957, tekanan pokoknya adalah memperbesar tenaga beli rakyat secara berangsur-angsur. Untuk memperbesar tenaga beli (daya beli) rakyat, maka pembangunan harus diprioritaskan pada penyempurnaan produksi barang-barang kebutuhan pokok rakyat, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Seajar dengan itu, pendidikan rakyat juga harus digenjot besar-besaran.⁷⁹

Pada tahap lanjutan, di mata Bung Hatta, politik ekonomi Indonesia perlu memikirkan pembangunan berbagai macam industri olahan. Untuk sektor ini, sektor partikular (swasta) dan usaha campuran bisa dilibatkan. Tetapi industri tidak dapat dibangun jikalau tenaga penunjang primernya, yakni tenaga listrik, belum maksimal. Oleh karena itu, Hatta menegaskan, pembangunan atau elektrifikasi 100% harus menjadi prioritas tingkat tinggi. Masalah lain yang tak

⁷⁸Rustam Efendi, *Konsep koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Vol15, 2018, hal.19

⁷⁹Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djilid 2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1958) hlm.12 hal 66

boleh ditinggalkan, kata Bung Hatta, adalah soal transmigrasi. “Kalau ini tidak terpecahkan, maka Indonesia tidak bakal makmur seperti yang dicita-citakan,” katanya.⁸⁰

Untuk memperkuat modal pembangunan, maka Hatta mengajurkan agar ekspor digenjut. “Ekspor harus dipandang sebagai alat pembayar impor barang-barang kapital yang sangat diperlukan,” ungkap Hatta. Dengan demikian, makin maju industri dan perusahaan buat ekspor, makin ringan pula beban kapital pinjaman.⁸¹

a) Landasan Sistem Ekonomi di Indonesia

Landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang). Keadilan menjadi

⁸⁰ Ibid, hlm 70

⁸¹ Mohammad Hatta, *Daulat Rakyat Dan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Tintamas, 1979)hal. 21

sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus.⁸²

butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

b) Macam-macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja.⁸³

Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah :

- a. Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana.
- b. Hanya sedikit menggunakan modal.
- c. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang).
- d. Belum mengenal pembagian kerja.
- e. Masih terikat tradisi.
- f. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran.

⁸² Ahmad Erani Yustika, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hal. 21

⁸³ Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI-Press, 1985) hal 24

Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat.
- b. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul.
- c. Tidak individualistis.

Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah :

- a. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah.
- b. Mutu barang hasil produksi masih rendah.

Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku badui dalam, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁴

2. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.⁸⁵ Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

⁸⁴Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI-Press,1985)hal. 29

⁸⁵Mubyarto, Ilmu Ekonomi, *Ilmu Sosial dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980) hal 23

Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :

- a. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.
- b. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
- c. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba.
- d. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta).
- e. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar.
- f. Persaingan dilakukan secara bebas.
- g. Peranan modal sangat vital.

Kelebihan dari sistem ekonomi liberal antara lain:

- d. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
- e. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
- f. Munculnya persaingan untuk maju.
- g. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar.
- h. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba.

Kelemahan dari sistem ekonomi liberal antara lain:

- a. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.
- b. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
- c. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
- d. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

3. Sistem Ekonomi Terpusat

Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi.⁸⁶

Ciri dari sistem ekonomi terpusat adalah :

- a. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah.
- b. Hak milik perorangan tidak diakui.
- c. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian.
- d. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat adalah:

- a. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.
- b. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.
- c. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.
- d. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.
- e. Jarang terjadi krisis ekonomi.

Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah :

- a. Mematikan inisiatif individu untuk maju

⁸⁶Mubyarto, Ilmu Ekonomi, *Ilmu Sosial dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980) hal 28

- b. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
- c. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.⁸⁷

Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah :

- a. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.
- b. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
- c. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
- d. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang.
- e. Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara-negara eropa barat yang berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi

⁸⁷Mubyarto, Ilmu Ekonomi, *Ilmu Sosial dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980) hal 32

sosialis atau komunis. Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan Indonesia.⁸⁸

Namun perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.⁸⁹

5. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial yaitu:⁹⁰

- a. Berdaulat di bidang politik
- b. Mandiri di bidang ekonomi
- c. Berkepribadian di bidang budaya

Yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial yaitu :

- a. Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi.

⁸⁸ Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI-press.1985) hal. 38

⁸⁹ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980)hal.65

⁹⁰ Sarbini Sumawinata, *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)hal. 29

- b. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural
- c. Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi⁹¹

Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

- a. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
- b. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.
- c. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.
- d. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai

⁹¹Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI-press.1985) hal, 41

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Memang sangat disayangkan bahwa penjelasan tentang demokrasi ekonomi ini sekarang sudah tidak ada lagi karena seluruh penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR untuk dihilangkan dengan alasan naif, yang sulit kita terima, yaitu “di negara negara lain tidak ada UUD atau konstitusi yang memakai penjelasan. Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan yaitu⁹²:

- a. Membangun Indonesia yang berdiikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- c. Mendorong pemerataan pendapatan rakyat.
- d. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Lima hal pokok yang harus segera diperjuangkan agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi wacana saja.

- a. Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya.
- b. Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition).
- c. Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.

⁹²Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

- d. Penguasaan dan redistribusi kepemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap.

Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif, melainkan pada paradigma fondasi.⁹³



⁹³ Sarbini Sumawinata, *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)hal 46

BAB III

TAN MALAKA DAN KARYA-KARYANYA

A. Biografi Tan Malaka

Tan Malaka atau Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka (lahir di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, panggilan akrabnya pada waktu itu adalah Ibrahim. Menurut Harry A. Poeze, seorang ahli sejarah dan guru besar berkebangsaan Belanda mengatakan bahwa, tahun kelahiran Tan Malaka secara tepat tidak diketahui. Karena pada waktu itu belum ada register (daftar) penduduk bagi orang Indonesia. Harry A. Poeze cenderung untuk menganggap tahun 1894 sebagai tahun kelahiran Tan Malaka yang paling tepat, melihat fakta bahwa pada tahun 1903 ia mengikuti pendidikan di sekolah rendah. Maka, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ketika itu ia berusia kurang lebih 6 tahun.⁹⁴

Tan Malaka menyatakan bahwa keluarganya beragama Islam dan beradat asli Minangkabau. Ia lahir dalam kultur yang peduli terhadap pendidikan dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan juga keluarganya termasuk taat kepada ajaran Islam.⁹⁵ Tan Malaka memulai pendidikannya dengan masuk

⁹⁴Harry Poeze A , *Tan Malaka Gerakan kiri, dan Revolusi Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000)hal 15

⁹⁵Tan Malaka, *Dari Penjara Ke Penjara Bagian II*,(Jakarta:Yayasan Massa, 1981)hal.72

sekolah kelas II Suliki dari 1903-1908, kemudian guru-gurunya mendorong dan membantu agar Ibrahim melanjutkan pendidikannya karena anak didik mereka mempunyai otak yang cerdas dan tajam. Atas bantuan mereka, Ibrahim melanjutkan pendidikan ke sekolah guru-guru negeri atau sekolah raja. Sekolah ini merupakan tempat pendidikan untuk guru-guru pribumi di fort de kock atau bukit tinggi.⁹⁶

Setelah tamat belajar disekolah guru pada Oktober 1913, Bersama keluarga horensma, guru disekolah raja yang menganggapnya sebagai anak sendiri, Tan Malaka berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan di Rijks kweek School (sekolah guru) di Harleem atas bantuan biaya dari yayasan Engku Fond. Biaya itu dianggap sebagai pinjaman yang akan dibayarnya kelak apabila sudah bekerja dan sudah berpenghasilan.⁹⁷

Di Belanda, watak Tan Malaka terbentuk: membaca, belajar, dan menderita. Di sana dia menutupi kekurangan uang dengan belajar bahasa melayu, sambil berusaha menyelesaikan sekolah, dan berjuang melawan sakit bronkritis, yang bermula hanya karena tidak memiliki baju hangat pada musim dingin. Dia bahkan pernah mencalonkan diri untuk Tweede Kamer (parlemen) Belanda mewakili negeri jajahan.⁹⁸

Tan Malaka lalu berkenalan dengan teori revolusioner, sosialisme, dan Marxisme-komunisme melalui berbagai buku dan brosur. Bahkan dia sempat

⁹⁶Wasid Suwanto, *Mewarisi Gagasan Tan Malaka*, (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2006) Hal 29

⁹⁷ Ibid, hal. 31

⁹⁸Taufik Andi susilo, *Tan Malaka, Biografi Singkat*, (Jakarta: Restu Agung, 2004) Hal.15

diminta Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) mewakili Indische Vereeniging dalam kongres pemuda Indonesia dan pelajar Ideologi di kota Deventer, Melalui interaksi dengan mahasiswa Indonesia dan Belanda, diasemakin yakin bahwa keyakinan itu dia pegang secara konsisten. Itulah masa awal dalam pengembangan politiknya.⁹⁹

Pada November 1919, setelah kecamuk perang dunia I usai, Tan Malaka pulang ke Indonesia. Ia kembali ke Indonesia untuk bekerja sebagai guru di Tanjung Morawa ini, matanya mulai terbuka ketika Tan Malaka melihat betapa kejamnya sistem kapitalis yang dipraktekkan di perkebunan tersebut yang memperlakukan bangsanya sebagai kuli kontrak. Sistem kapitalis itu melilit dan membelenggu kuli kontrak hingga pasrah menerima nasib mereka. Kuli-kuli kontrak perkebunan itu tidak berdaya dan tidak ada orang yang memperdulikan mereka. Maka terjadilah penindasan dan penghisapan manusia atas manusia. Dengan pikiran jernih dan hati yang mantab Tan Malaka menentukan pilihan meninggalkan semua kemewahan, keistimewaan, dan kenikmatan sebagai guru perkebunan yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Belanda. Tan Malaka membuat anjang-ancang dan persiapan untuk menerjunkan diri sepenuhnya kemedan politik guna memperjuangkan nasib bangsa melawan sistem kapitalis kolonial yang menjajah tanah air Indonesia.¹⁰⁰

⁹⁹Taufik Andi susilo, *Tan Malaka, Biografi Singkat*, (Jakarta: Restu Agung, 2004) hal. 20

¹⁰⁰Wasid Suwanto, *Memperkenalkan Tan Malaka Pahlawan Kemerdekaan Nasional Yang Paling tidak dikenal Dalam Madilog*, (Jakarta: Pustaka Data Indikator, 1999) hal.32

Tan Malaka memutuskan berhenti dari pekerjaannya kemudian berlayar ke Jawa dengan tujuan ke Semarang untuk menemui teman-temannya yang telah dihubungnya. Mereka bersedia membuka jalan bagi Tan Malaka untuk memasuki arena perjuangan politik. Cita-cita dan tekad yang sudah lamadipendamnya adalah mendirikan perguruan yang cocok dengan keperluan dan jiwa rakyat murba.¹⁰¹

Ketika bertemu dan bertukar pikiran dengan Semaun, Semaun berkata, “nanti kami akan berusaha agar saudara dapat memimpin perguruan. Ini memang sudah pada tempatnya”. Beberapa waktu kemudian, Semaun membuat rapat istimewa bagi anggota Sarekat Islam (SI) Semarang dan mengusulkan pendirian sebuah perguruan. Usul ini diterima dengan baik, dan pendaftaran bahkan dimulai hari itu juga. Gedung sekolah tidak menjadi halangan karena Sarekat Islam (SI) Semarang mempunyai gedung sendiri untuk rapat. Untuk sementara, Gedung tersebut akan dijadikan sebagai sekolah. Perlengkapan belajar juga dikumpulkan secara bergotong royong. Dalam waktu dua tiga hari saja, Tan Malaka sudah bisa memulai mengajar disekolah tersebut dengan 50 murid baru. Dalam brosur kecil Sarekat Islam Semarang dan Onderwijs, Tan Malaka memaparkan dasar dan tujuan perguruan itu serta mencapai tujuannya. Sekolah itu resminya bernama sekolah rakyat tetapi masyarakat mengenalnya sebagai sekolah Tan Malaka. Demikianlah gambaran sekilas tentang kegiatan Tan

¹⁰¹ Taufik Andi susilo, *Tan Malaka, Biografi Singkat*, (Jakarta: Restu Agung, 2004) hal.25

Malaka dalam bidang pendidikan sebagai awal aktifitasnya dalam medan perjuangan bangsa¹⁰²

Tahun 1921-1922 merupakan permulaan nyata bagi karir politik Tan Malaka karena dia mendirikan sekolah rakyat yang pertama di Semarang. Keadaan waktu itu tidak memungkinkan dia membatasi kegiatannya hanyadalam bidang pendidikan saja. Kaum buruh sedang menggeliat, bergerak menghadapi kekejaman pertumbuhan kapitalisme kolonial Hindia Belanda. Jumlah tenaga pimpinan, kader, dan aktifis perjuangan masih terbatas. Maka, mau tidak mau Tan Malaka terseret untuk terjun dalam gerakan buruh. Pertama, dia terpilih menjadi wakil ketua Serikat Pegawai Pelikan Hindia (SPPH Tambang Minyak Cepu), dengan Semaun sebagai pendiri dan ketuanya. Kemudian dia juga terpilih sebagai ketua merangkap bendahara Sarekat Pegawai Percetakan.¹⁰³

Pada waktu Semaun berangkat ke luar negeri guna menghadiri kongres buruh di Moskow dan melakukan kegiatan lain sehingga cukup lama meninggalkan Indonesia. Akibatnya jabatan ketua PKI kosong, sementara banyak masalah perjuangan yang harus ditangani. Akhirnya pada Desember 1921, PKI mengadakan Kongres VIII SI Semarang. Untuk menghindari kekosongan ketua, Kongres memilih Tan Malaka mewakili Semaun menjadi ketua Partai sekalipun ia sudah menyatakan keberatannya. Dengan jabatan baru ini, tentu saja kegiatan politiknya, di samping kegiatan dalam pergerakan buruh

¹⁰² Abdul Gani dkk, *Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan*, (Jakarta: Restu Agung, 2001) hal. 11

¹⁰³ Wasid Suwanto, *Memperkenalkan Tan Malaka Pahlawan Kemerdekaan Nasional Yang Paling tidak dikenal Dalam Madilog*, (Jakarta: Pustaka Data Indikator, 1999) hal

dan pendidikan, makin meningkat dan makin menonjolnya sebagai tokoh gerakan. Posisi seperti itu dengan sendirinya menyebabkan Tan Malaka menjadi sasaran penangkapan dan penahanan penguasa kolonial.¹⁰⁴

Waktu itu Tan Malaka baru berusia 25 tahun dan dia juga menjadi anggota dewan Gemeente (Dewan Kota) Semarang. Pada 13 Februari 1922, ketika berada di Bandung untuk memeriksa gedung Sekolah Rakyat kedua, akhirnya Tan Malaka yang kegiatan dan gerak-geriknya dengan ketat dan tajam selalu diikuti Polisi Rahasia Belanda (PID) ditangkap dan ditahan. Sebenarnya penangkapan ini sudah lama diantisipasi, penyebab utamanya adalah pemogokan pegawai pegadaian.¹⁰⁵

Tan Malaka dibuang keluar Indonesia atau tepatnya di Kupang, Pulau Timor pada tanggal 2 Maret 1922 oleh putusan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi Tan Malaka minta dibuang keluar Hindia Belanda, setelah perdebatan seru antara sesama pejabat Hindia Belanda, permintaan Tan Malaka itu dikabulkan sesuai putusan pemerintah tanggal 10 Maret 1922 no. 2 isinya menyatakan bahwa Tan Malaka secepatnya harus meninggalkan Hindia Belanda dan segala ongkos perjalanan menjadi tanggungan sendiri. Pada waktu itu Tan Malaka menulis sebuah brosur pembelaanya berjudul Tunduk Kepada Kekuasaan Tetapi Tidak Tunduk Kepada Kebenaran. Tanggal 29 Maret 1922, dengan kapal Insulinde Tan Malaka bertolak dari Tanjung Priok dengan pengawalan ketat. Ia berlayar

¹⁰⁴Harry Poeze A , *Tan Malaka Gerakan kiri, dan Revolusi Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000)hal 46

¹⁰⁵.Harry Poeze A , *Tan Malaka Gerakan kiri, dan Revolusi Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000)hal 49

melalui Teluk bayur, Padang. Di tempat ini dia dilarang turun kedarat menemui teman-teman dan anggota keluarganya yang siap menemaninya untuk memberi salam perpisahan.¹⁰⁶

Dengan pembuangan itu, dimulailah perjuangan Tan Malaka di luar Negeri, di gelanggang Internasional. Setelah lebih 20 tahun berikutnya, barulah ia menyusup masuk kembali ketanah air. Dalam Kongres Komintern IV tahun 1922 yang diadakan di Moskow Tan Malaka hadir mewakili Indonesia. Di sana ia mendapat sorotan tajam karena menentang sikap permusuhan Komintern terhadap Pan-Islamisme yang dianggap sebagai kekuatan Borjuis yang tidak dapat dipercaya.¹⁰⁷ Tan Malaka menekankan potensi revolusioner Islam di wilayah-wilayah jajahan dan pentingnya bekerja sama dengan mereka. Di Indonesia, sejak awal penjajahan Belanda sampai akhirnya kebangkitan kesadaran Nasionalisme, pemberontakan melawan penjajah selalu dilakukan oleh potensi Islam, antara lain SI. Sebab, kebanyakan orang Islam adalah petani dan buruh miskin tertindas yang menginginkan kebebasan nasional dari cengkeraman kolonial.¹⁰⁸

Meskipun ada pertentangan seperti itu, Tan Malaka tetap diangkat menjadi wakil Komintern untuk Asia Tenggara pada pertengahan 1923, kemudian ia berangkat menuju Cina dan mendirikan Markas Besar di Kanton. Di

¹⁰⁶Harry A Poeze, *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik 1927-1997*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000)hal 51

¹⁰⁷Harry A Poeze, *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik 1927-1997*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000).55

¹⁰⁸Rudolf Mrazeek, *Semesta Tan Malaka*, (Yogyakarta: Biografi Publishin, 1994)hal.27

tempat itu dia bertemu dan berkenalan dengan Sun Yat Sen serta sejumlah pemimpin Cina lainnya. Asia tenggara yang menjadi daerah tanggung jawabnya meliputi Burma, Siam, Annam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Pada bulan oktober 1925, pimpinan PKI waktu itu, Sardjono, Alimin, dan Muso mengadakan rapat gelap di Candi Prambanan, Yogyakarta.¹⁰⁹ Mereka memutuskan pemberontakan melawan penindasan dan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Walaupun keputusan itu tidak disetujui oleh Tan Malaka sebagai pimpinan tertinggi Komintern Asia, sebab menurut perhitungan perbandingan kekuatan dan keadaan, mengadakan pemberontakan waktu itu sama dengan bunuh diri bagi PKI, akhirnya pemberontakan PKI meletus juga di Jawa Barat pada bulan November 1926 dan di Sumatra Barat, Januari 1927. Namun yang terjadi hanyalah gejolak kerusuhan kecil di tingkat lokal yang mudah dipadamkan dan ditindas oleh pemerintah Hindia Belanda.¹¹⁰

Melihat kenyataan seperti itu Tan Malaka melepaskan dan memisahkan diri dari PKI, dan hubungan dengan Komintern pun merenggang. Bersama temannya yaitu Subakat, Djamaludin Tamim, dan Budi Sucitro, yang sehaluan dan sejalan, Tan Malaka akhirnya menempuh jalan sendiri, bersikap, dan bertindak mandiri. Pada april 1925, Tan Malaka menulis buku Menuju Republik Indonesia. Buku aslinya ditulis dalam bahasa Belanda karena memang ditujukan kepada kaum terpelajar Indonesia yang akan menjadi calon pemimpin

¹⁰⁹ Rudolf Mrazek, *Semesta Tan Malaka*, (Yogyakarta: Biografi Publishin, 1994)hal.30

¹¹⁰ Hary Prabowo, *Perspektif Marxisme Tan Malaka, Teori dan Praktis Menuju Republik*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2000)hal.26

politik nasional masa datang, baik yang berada di tanah air maupun di Negeri Belanda. Tahun 1927, bersama Subakat dan Djamaludin Tamim, Tan Malaka memproklamasikan pendirian Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok. Partai ini bergerak di bawah tanah sebagai sarana perjuangan pendirian RI. Kemudian pada tahun 1932 Tan Malaka Berhasil masuk Hongkong dengan nama Ong Soong Lee, kemudian tertangkap oleh Polisi Rahasia Inggris. Setelah lebih kurang 2 setengah bulan ditahan dalam penjara Hongkong, Tan Malaka mendapat keputusan dikeluarkan ke Syanghai. Kemudian pada tahun 1936 ia mendirikan dan mengajar pada School For Foreign Languages di Amoy, Cina.¹¹¹

Tan Malaka merupakan tokoh promotor Persatuan Perjuangan yang mengikatkan persatuan antara sejumlah 141 organisasi terdiri dari pimpinan partai, serikat-serikat buruh, pemuda, wanita, tentara, laskar dan lain-lain, di atas dasar 10 program revolusi yang dikenal dengan nama 7 Pasal Minimum Program, menolak politik kompromi dengan imperialis Belanda yang dimulai dengan politik 1 November dan 3 November 1945. dan menentang politik kompromi Linggarjati pada tahun 1947 dan tahun 1948 dan Renville.¹¹²

Pada tahun yang sama pula Tan Malaka mendirikan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) yang melanjutkan Program Persatuan Perjuangan, dan melancarkan serangkaian Gerilya Pembela Proklamasi (GPP) yang berpusat di Jawa Timur. Dan karena gerakannya yang tidak setengah-setengah di dalam menentang bentuk-bentuk kolonialisme dan pemerintah waktu itu, maka pada

¹¹¹ Hary Prabowo, *Perspektif Marxisme Tan Malaka, Teori dan Praktis Menuju Republik*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 200) hal, 31

¹¹² Ibid, hal 36

tahun 1949 Tanggal 19 Februari napas terakhirnya direnggut ketika ia bersamasama 20 orang pemuda pengawal ditembak mati di pinggir Sungai Brantas, tepatnya di Desa Mojo, sebelah selatan kota Kediri, Jawa Timur. Penembakan itu atas perintah Letnan 1 Kolonel Surachmad dan Panglima dan TNI Jawa Timur Kolonel Soengkono, di saat beliau sedang memimpin revolusi melawan agresi Belanda, di saat itu pula para pemimpin pemerintahan pusat di Jogja sudah banyak yang ditangkap dan ditawan Belanda¹¹³

B. Karya-Karya Tan Malaka

Tan Malaka sebagaimana yang sudah diketahui, termasuk penulis yang cukup produktif dalam menuangkan alam pikirannya. Berikut ini adalah karyakaryanya:

Karya penting Tan Malaka yaitu *Gerpolek* (Gerilya, Politik, Ekonomi). Ditulis di penjara Madiun 1948. Berisi tentang ajarannya dalam melakukan gerilya politik maupun ekonomi dan menjelaskan tentang cara bergerilya dalam politik dengan strategi militer, maupun dengan penguatan ekonomi dengan merebut seluruh kekayaan asing. Keduanya menjadi satu dan saling menguatkan.¹¹⁴ Dalam buku ini Tan Malaka benar-benar memaparkan bagaimana melawan penjajah Belanda, buku ini juga menjelaskan bahwa pentingnya persatuan rakyat untuk membangun kekuatan masa yang nantinya akan menggilas penjajah Belanda. Aura perjuangan begitu terasa setelah

¹¹³ Hary Prabowo, *Perspektif Marxisme Tan Malaka, Teori dan Praktis Menuju Republik*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2000) hal.38

¹¹⁴ Rambe, Safrizal, *Pemikiran Politik Tan Malaka, Kajian Terhadap Perjuangan "Sang Kiri Nasionalis" Jalan Penghubung Memahami Madilog*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003) hal 56

membaca buku ini, Tan Malaka jugamemaparkan bahwa pentingnya merdeka 100% dimana hak-hak kita yangdirampas oleh penjajah seperti alat produksi dan lai-lain semua dikembalikankepada rakyat Indonesia, dengan begitu revolusi Indonesia benar-benar tercipta.¹¹⁵Tan Malaka juga menjelaskan bahwa ekonomi sosialislah yang tepat diterapkan diIndonesia ini. Gerilya politik ekonomi (Gerpolek) adalah buku yang ditulisnyadipenjara setelah perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Karya terbesarTan Malaka lainnya adalah Materialisme, Dialektika dan Logika. Dari Pendjarake Pendjara, ditulis pada tahun 1946-1947 di Penjara Ponorogo, yang berisitentang riwayat hidup (otobiografi). Ia menguraikan perjalananya dari suatunegara ke negara lain untuk menghindar dari kejaran agen-agen kolonial. Ia jugamemaparkan pandangan tentang kepercayaan, filsafat dan tentang negara. Daribuku inilah kebanyakan para peneliti mendapat gambaran kehidupan TanMalaka yang revolusioner.¹¹⁶

Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia), diterbitkan di Canton, April 1925. Berisi tentang uraiannya akan kondisi Dunia, pertentangandua sistem antara Kapitalisme dan Komunisme yang diyakininya akandimenangkan oleh Komunisme. Dilanjutkan dengan situasi di Indonesia di manapenjajah Belanda melakukan penjajahan dengan biadab, namun Tan Malaka

¹¹⁵Tan Malaka. *Gerilya Politik Ekonomi* (Geporlek), (Yogyakarta: Jendela, 2000), hal.21

¹¹⁶Rambe, Safrizal, *Pemikiran Politik Tan Malaka, Kajian Terhadap Perjuangan "Sang KiriNasionalis" Jalan Penghubung Memahami Madilog, Cet. I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003)hal 59

yakinsuatu saat penjajah akan kalah apabila semua organisasi perjuangan yang adaterutama PKI, dapat menyusun tujuan revolusionernya.¹¹⁷

Selain karyanya yang besar Tan Malaka juga banyak menulis beberapabrosur diantaranya Massa Aksi, ditulis di Singapura tahun 1926. Secara umum brosur ini berisi tuntutan bagaimana melakukan sebuah revolusi di Indonesia. Sebuah revolusi terutama di Jawa dan Sumatera adalah sesuatu yang tak dapat dihindarkan, baginya tidak ada sikap yang netral, yang ada adalah berpihak pada penjajah Belanda atau rakyat terjajah Indonesia.¹¹⁸

Dari sini kemudian baru Tan Malaka beralih pada bagaimana menjalankan revolusi yang benar, tidak bisa dicapai oleh pemberontakan atau kudeta secara anarkis. *SI Semarang dan Onderwijs*, Ditulis di Semarang tahun 1921 pada saat Tan Malaka berusaha merumuskan tujuan pendidikan dari sekolah Serikat Islam yang mulai dibangunnya (dikenal juga dengan sekolah Tan Malaka). Berisi pokok-pokok pikiran yang akan dikembangkan/diajarkan dalam sekolahnya. Kemudian tulisan-tulisan beliau yang lain diantaranya, *Asia Bergabung* (Gabungan Asia), Ditulis tahun 1943, walaupun menurut Poeze hanya selesai separuh, *Semangat Moeda*, ditulis di Manila tahun 1926, namun oleh Tan Malaka dikatakan di Tokyo sebagai tempat penerbitannya, *Politik*, ditulis di Surabaya pada tanggal 24 November 1945 berisi tentang percakapan antara Godam (simbolisasi kaum buruh), Pacul (petani), Toke (pedagang), Den Mas (ningrat) dan Mr. Apal (wakil kaum intelektual).

¹¹⁷ Tan Malaka, *Naar Dee Republiek "Menuju Indonesia Merdeka"* (Jakarta: Yayasan Massa, 1978) hal, 10

¹¹⁸ Tan Malaka, *Aksi Massa*, (Jakarta: Teplok Press, 2000) hal. 21

Menguraikan tentang bagaimanacaranya merdeka, maksud dan tujuan kemerdekaan, serta bagaimana mengisikemerdekaan itu dan yang tak kalah penting adalah Indonesia Merdeka harusberdasarkan sosialisme.¹¹⁹

Rentjana Ekonomi, ditulis di Surabaya pada tanggal 28November 1945 menguraikan tentang percakapan dengan simbolisasi yang samaseperti yang ada dalam tulisanya Politik. menerangkan tentang rencanapembangunan ekonomi, yang menurutnya ekonomi sosialislah yang dapatmembawa kemakmuran bagi Indonesia kelak, Moeslihat, ditulis di Surabaya padatanggal 2 Desember 1945 Berisi tentang percakapan dengan simbolisasi yangsama seperti yang ada dalam Politik yaitu menguraikan tentang strategi dan taktikdalam perjuangan untuk membawa Indonesia ke arah kemerdekaan.¹²⁰

ManifestoPARI (Manifesto Jakarta), ditulis di Jakarta tahun 1945. Menguraikan tentangpertentangan sistem yang ada di Dunia, antara Kapitalisme dengan Komunismeyang menurutnya akan dimenangkan oleh komunisme serta penolakan ataspercobaan pendirian Republik Indonesia yang kapitalis dan membatalkan semuaupaya dari luar untuk menjajah kembali Indonesia dengan cara apa pun, Thesis,ditulis tahun 1946 di Lawu. Berisi tentang ajarannya mengenai pembentukanNegara sosialis. Uraian tentang perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesiaseratus persen. Juga pembelaannya terhadap tuduhan Trotskys yang selaludituduhkan kepadanya, berkenaan dengan pemberontakan

¹¹⁹Tan Malaka, *SI Semarang dan Onderwijs*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987)hal.13

¹²⁰Tan Malaka,*Muslihat Politik, Renjana Ekonomi Berjuang*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987)hal8

PKI 1926 yang gagaldan oleh pihak PKI kegagalan itu selalu dialamatkan kepada Tan Malaka.¹²¹

Surat Kepada Partai Rakyat, ditulis 31 Juli 1948 di penjara Magelang sebagaisambutan tertulis dalam pembentukan Kongres Partai Rakyat tanggal 10-11-12 Agustus 1948 berisi tentang bagaimana mengorganisasikan Partai Rakyat agar menjadi partai yang memperhatikan dan memperjuangkan rakyat MURBA, Proklamasi 17-8-1945, Isi dan Pelaksanaannya, Pidato tertulis pada Kongres Rakyat Indonesia Desember 1948. Berisi tentang penolakan perundingan yang dilakukan Indonesia saat itu dan persiapan perang kemerdekaan dalam menghadapi agresi militer Belanda, Uraian Mendadak, merupakan salinan tertulis dari pidato yang diucapkan di depan Kongres peleburan tiga partai (Partai Rakyat, Partai Buruh, dan Partai Rakyat Jelata) menjadi Partai Murba. Berisi tentang reorganisasi partai dan uraian untuk tetap mempertahankan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.¹²²

Karya-karya tulis Tan Malaka meliputi semua bidang kemasyarakatan dan ke-Negeraan-politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran, terlihat benang putih keilmiahan dan ke-Indonesia-an, serta benang merah orisinalitas, kemandirian, kekonsekuenan, dan konsistensi yang dirasa jelas dalam gagasan-gagasan perjuangan implementasinya dalam rumusan konsepsional dan penjabaran operasionalnya.¹²³

¹²¹Tan Malaka, *Manifesto PARI*, (Jakarta: Penerbit Wijaya, 2000) hal. 17

¹²²Tan Malaka, *Dari Penjara Kepingjara, Jilid I*, (Jakarta: Teplok Perss) hal 26

¹²³ Hary Prabowo, *Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000) hal. 13

Dari tulisan-tulisan itulah siapa pun kini bisa mengenal dan menyelami gagasan-gagasan Tan Malaka. Siapa pun bisa dengan leluasa membedah apa yang sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian Tan Malaka. Dan mereka akan dengan mudah mendapatkan ciri khas gagasan-gagasannya, yaitu selalu berlandaskan cara berpikir ilmiah, berdasarkan ilmu bukti, mengutamakan Indonesia, memandang jauh ke depan, serta mandiri, konsekuen, dan konsisten. Penulis beranggapan bahwa karya-karya Tan Malaka yang benar-benar bias mewakili itu semua terangkum jelas pada buku *Gerpolek* (*Gerilya Politik Ekonomi*) yang di tulisnya ketika ia berada dalam penjara di Madiun pada tahun 1948. Dalam buku ini Tan Malaka mencoba merevisi ulang tentang konsep atau cara bergerilya dalam melawan penjajah, cara bernegosiasi dalam berpolitik dan cara menjalankan ekonomi Indonesia pasca kolonial.¹²⁴ Yang menjadi garis besar dalam tulisan ini Tan Malaka anti bernegosiasi apapun terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka menginginkan kemerdekaan 100% dengan cara bergerilya dan merebut kembali alat produksi yang dimiliki oleh kolonial. Dengan begitu kita merdeka 100% menurut Tan Malaka, apabila kemerdekaan tidak bisa mengembalikan alat-alat produksi yang dimiliki oleh penjajah maka ini adalah kemerdekaan semu. Maka tawaran Tan Malaka adalah Gerilya Politik dan ekonomi.¹²⁵

C. Latar Belakang Pemikiran Tan Malaka

¹²⁴ Tan Malaka. *Gerilya Politik Ekonomi (Geporlek)*, (Yogyakarta: Jendela, 2000), hal.19

¹²⁵ Rambe, Safrizal, *Pemikiran Politik Tan Malaka, Kajian Terhadap Perjuangan "Sang Kiri Nasionalis" Jalan Penghubung Memahami Madilog, Cet. I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), hal.24

Latar belakang pemikiran Tan Malaka tidak lepas dengan ruang dan waktusosio-politik kultural yang melingkupinya. Paling tidak, ada tiga situasi dankondisi penting yang mewarnai pandangan atau pola berpikir Tan Malaka yaitu,keadaan Internasional, Minangkabau dan Alam Pikiran Barat.

1) Keadaan Internasional.

Pada tahun 1918, terjadi perjanjian Versailles. Pada waktu itu duniasedang gemuruh. Sebuah Negara besar dan baru yang dalam segala hal munculialah Sovyet Rusia. Pada zaman itu Tan Malaka masih muda, masih belajar diEropa Barat. Dalam usia Sturm und Drang periode itu, dalam usia sedangbergelora itu Tan Dilondong topan yang bertiup dari Eropa Timur. Dunia Baratsendiri pada masa itu seakan-akan mengikuti Sovyet Rusia. Dari dunia EropaTimur itulah Tan mendapatkan semua ilham dan petunjuk yang ia rasa perlu buatperjuangan politik, ekonomi dan sosial di negerinya.¹²⁶

Di bidang politik Eropa, terjadi dampak pergolakan politik Pasca-perangDunia I di Eropa pada umumnya dan di Belanda pada khususnya. RevolusiOktober 1917 di Rusia yang disusul oleh gerakan revolusioner kaum SosialDemokrat Belanda yang dipimpin oleh Troestra yang kemudian memberi inspirasikepada unsur-unsur progresif Indonesia untuk menuntut pemerintahan sendiri danperwakilan hak-hak yang luas.

Sedangkan di bidang ekonomi, Perang Dunia I mengakibatkan kemacetanpengangkutan hasil perkebunan sehingga pengusaha perkebunan

¹²⁶Roselan Abdulgani, dkk. *Soedirman-Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan*, (Jakarta:Restu Agung, 2004), hal 137

mengurangi produksinya sehingga berakibat rakyat banyak kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Penderitaan rakyat bertambah besar lebih-lebih karena Gubernur menmembebankan pajak yang lebih berat kepada rakyat.¹²⁷

Perkembangan politik kolonial Belanda adalah politik kolonial konservatif tahun 1800-1848, *cultuurstelsel* tahun 1830-1870, permulaan politik kolonial liberal tahun 1850-1870 dan politik etis tahun 1900, yakni edukasi, irigasi dan migrasi. Tan Malaka lahir pada akhir abad ke-19, ketika diberlakukannya politik etis Belanda. Politik etis ini merupakan politik balas budi bangsa Belanda kepada Hindia Belanda oleh keuntungan yang diperolehnya selama dasawarsa-dasawarsa yang lalu.¹²⁸

Kebijakan politik ini adalah terbukanya kesempatan yang makin luas dikalangan pribumi untuk memperoleh pendidikan modern ala Belanda. Pendidikan ini juga untuk memenuhi kebutuhan atas tenaga-tenaga terdidik untuk birokrasi. Dari sinilah munculnya beberapa intelektual muda yang bersentuhan dengan pemikiran Barat, termasuk tentang Nasionalisme.¹²⁹

2) Alam Pikiran Barat

Kelak pada perkembangan kehidupannya Tan Malaka memiliki pandangan bahwa Islam memiliki kekuatan revolusioner dan dapat menjadi alat

¹²⁷A. Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 146.

¹²⁸A. Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 30

¹²⁹Hasyim Wahid, dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia* Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal 5

untuk melawan kolonialisme dan imperialisme dengan melakukan pembelaan dan menganjurkan PKI untuk bekerja dengan Serikat Islam. Di bidang agama perhatiannya besar sekali pada soal-soal mistik; tetapi di bidang sosial ia sudah memilih gagasan komunisme.¹³⁰

Kepergiannya ke negeri Belanda bisa disebut sebagai jendela awal perkenalannya pada dunia luar. Berkenalan dirinya dengan paham sosialisme dan menjadikannya berkenalan dengan pemikiran Nietzsche dan karya-karyanya *Th. C. Arlyle*, hal tersebut yang membuatnya berada dalam semangat dan paham revolusioner.¹³¹

Selanjutnya adalah persentuhan pemikiran Tan Malaka dengan berbagai kalangan sampai para aktivis, pemikir dan tokoh dunia Barat. Dengan didukung modal minat, semangat dan kecerdasan yang dimilikinya untuk belajar, Tan Malaka membawa banyak buku ketika menjalankan masa pembuangan yang pertama, dari Indonesia pada 22 Maret 1922. Buku-buku tersebut tentang Agama, Alquran dan Bibel, Budhisme, Konfusianisme, Darwinisme, ekonomi liberal, sosialis atau komunis, buku politik dari liberalisme sampai komunisme, riwayat dunia, ilmu perang dan buku sekolah dari ilmu berhitung sampai ilmu mendidik. Tan Malaka juga giat mengumpulkan buku-buku baru sewaktu di Tiongkok dan Indonesia, jaringan pergaulan, berorganisasi ditambah kemampuan penguasaan bahasa yang banyak, menjadi bekal perjuangannya di

¹³⁰Harry A. Poeze, *Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 305

¹³¹Fitri R. Ghazally, *20 Tokoh Nasional Abad 20*, (Jakarta: Penerbit Progress, 2004), hal 57

dalam maupun luar negeri. Menurut pengakuan Tan Malaka, ia menguasai berbagai Bahasa seperti, Belanda, Jerman, Inggris, Melayu, Jawa, Perancis, Tagalog, Siam, dan sedikit bahasa Cina. Dari kemampuan bahasa ini, Tan Malaka mendirikan sekolah bahasa di Amoy, School for Foreign Languages yang berkembang pesat kemajuannya.¹³²

Dari sebagian tulisannya, basis pandangan tentang realitas, Tan Malaka memilih menggunakan Materialisme dan Rasionalisme dan paham Komunisme sebagai ideologi perjuangan politik, meski Tan Malaka melakukan penafsiran ulang demi penyesuaian situasi dan kondisi Indonesia. Alam pikir Barat berperandam dalam perjalanan kehidupan Tan Malaka. Alam dan kerangka pikir Barat diselami, akan tetapi dalam penggunaannya disaring secara kritis dan dinamis.¹³³ Dari latar keadaan internasional, adat Minangkabau dan alam pikir Barat, tidaklah aneh jika dia dijuluki nasionalis, sosialis dan komunis yang beragama Islam.¹³⁴

D. Mengenal Buku Gerilya Politik Ekonomi (Gerpolek)

Dalam buku Gerilya Politik Ekonomi (Gerpolek) berbicara tentang republik Indonesia Tan Malaka membagi dua musim revolusi, yang pertama musim jaya berjuang dan yang kedua musim runtuh berdiplomasi. Musim jaya berjuang dimaknai sebagai peristiwa politik yang berlangsung pada tanggal

¹³² Harry A. Poeze, *Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal.113

¹³³ Ibid, hal.120

¹³⁴ Rambe, Safrizal, *Pemikiran Politik Tan Malaka, Kajian Terhadap Perjuangan "Sang Kiri Nasionalis" Jalan Penghubung Memahami Madilog, Cet. I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), hal.30

17 Agustus 1945 ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan musim runtuh berdiplomasi ditandai peristiwa penangkapan para pemimpin Persatuan Perjuangan di Madiun pada tanggal 17 Maret 1946 sampai 17 Mei 1948 dan perundingan-perundingan yang berlangsung sampai sekarang.¹³⁵

Penangkapan para pemimpin Persatuan Perjuangan berarti suatu percobaan pemerintah republik mengganti perjuangan massa aksi atau aksi murbadengan aksi berdiplomasi. Menukar diplomasi bambu runcing dengan diplomasi berunding. Menukar sikap “berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%” dengan sikap “mencari perdamaian dengan mengorbankan kedaulatan, kemerdekaan, daerah perekonomian dan penduduk” yang pada musim jaya bertempur semuanya ini sudah 100% berada di tangan bangsa Indonesia. Tegasnya menukar sikapnya bertempur terus sebagai musuh lenyap berkikis dari seluruhnya daerah Indonesia dengan sikap menyerah terus menerus buat mendapatkan perdamaian dengan musuh.¹³⁶

Mengganti tindakan yang sudah mengembalikan semua milik musuh ketangan rakyat Indonesia, yang berhak penuh atas milik musuh dengan usaha mengembalikan milik asing walaupun musuh. Menukar kehendak membangunkan ekonomi atas rencana sendiri, tenaga sendiri, dan bahan sendiri untuk kemerdekaan seluruhnya rakyat Indonesia dan kebahagiaan dunia lain dengan usaha kerja sama dengan kapitalis-imperialis Belanda, yang sudah 350

¹³⁵Tan Malaka, *Gerilya Politik Ekonomi (Gerpolek)*, (Yogyakarta: Pustaka Jendela, 2000), hal. 1

¹³⁶Ibid, hal. 6

tahunmemeras dan menindas rakyat Indonesia.¹³⁷Mengganti serangan terus menerus baik secara gerilya ataupun secaragerak-cepat (mobile warfare) dengan maksud menghalaukan atau menghancurkanmusuh dengan tindakan “cease-fire-order” (gencatan senjata) dan tindakanmengosongkan “kantong” (gerilya). Tegasnya, mengganti siasat keprajuritan yangbisa melemahkan dan akhirnya menaklukkan musuh dengan siasat yang memberikesempatan penuh kepada musuh untuk memperkokoh kedudukan dirinya sendiriserta memperlemahkedudukan kita.¹³⁸

Dalam hal politik, ekonomi Tan Malaka juga membagi dua hal itukedalam dua musim, yaitu musim jaya berjuang dan musim runtuh berunding.Dalam hal politik di musim jaya berjuang Tan Malaka mengartikan bahwaSeluruhnya tanah yang lebih dari 700.000 mil persegi serta tanah dan pir yanglebih kurang 4.500.000 mil persegi itu berada di bawah kedaulatan Republik.Sedangkan dimusim runtuh berunding Tan Malaka memaknai hal ini sebagaipengakuan “*de facto*” hasil perundingan Linggarjati, maka tanah Jawa-Sumatrayang berada di bawah kekuasaan republik luasnya cuma 210.000 mil persegi atau30% dari seluruhnya daratan Indonesia. Dengan laut di pesisir Jawa dan Sumatrakita menerima 225.000 mil persegi, atau $+ 1/20 = 5\%$ dari Tanah dan Airseluruhnya Indonesia.¹³⁹Tetapi dengan perjanjian Renville, maka hasil perundingan tadi sudahmerosot lebih rendah lagi. Enam atau tujuh daerah di Jawa

¹³⁷ Ibid,hal9

¹³⁸Tan Malaka, *Gerilya Politik Ekonomi (Gerpolek)*, (Yogyakarta: Jendela, 2000),hal
hal15

¹³⁹Ibid,hal.11

terpencar dari – dan beberapa daerah di Sumatera belum lagi lebih dari 2% dari pada seluruhnya Tanah dan Lautan Indonesia.¹⁴⁰

Dalam hal ekonomi di musim jaya berjuang Tan Malaka mengartikan bahwa Semua perkebunan (karet, kopi kina, aspal, dan lain-lain), semuanya pertambangan (minyak, arang, timah, bauksit, emas, perak), baik milik lawan ataupun kawan, berada di bawah kekuasaan republik.¹⁴¹ Di musim runtuh berunding Tan Malaka memaknai sebagai peristiwa perjanjian Linggarjati dan Renville mengakui pengembalian hak milik asing itu baik milik negara sahabat, ataupun milik negara musuh, (yaitu sesuatu Negara yang memasukkan tentaranya ke daerah Republik).¹⁴²

Gerpolek adalah perpaduan (persatuan) dari suku pertama dari tiga kata yaitu Gerilya, Politik, dan Ekonomi. Gerpolek adalah senjata sang gerilya untuk membela Proklamasi 17 Agustus dan mewujudkan kemerdekaan 100 % yang sekarang sudah menurun dibawah 10 %. Sang Gerilya, adalah seorang putera atau puteri, seorang pemuda atau pemudi Indonesia, yang taat-setia kepada proklamasi dan kemerdekaan 100% dengan menghancurkan siapa saja yang memusuhi proklamasi serta kemerdekaan 100 % itu.¹⁴³

Sang Gerilya, juga tidak menghiraukan lamanya waktu untuk berjuang. Walaupun perjuangan akan membutuhkan waktu seumur hidupnya,

¹⁴⁰ Hasyim Wahid, dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia Cet. I*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal 27

¹⁴¹ Tan Malaka, *Gerilya Politik Ekonomi* (Gerpolek), (Yogyakarta: Pustaka Jendela, 2000), hal 13

¹⁴² Ibid, hal 15

¹⁴³ Ibid. hal. 18

Sang Gerilya dengan tabah dan berani, serta dengan tekad bergembira, tetap melakukan kewajibannya. Yang dapat mengakhiri perjuangannya hanyalah tercapainya kemerdekaan 100 %. Sang Gerilya, tiadalah pula akan berkecil hati karena bersenjata sederhana dalam menghadapi musuh yang bersenjata serba lengkap. Dengan menggunakan taktik Gerilya, Politik dan Ekonomi, tegasnya dengan menggunakan Gerpolek, maka Sang Gerilya merasa hidup berbahagia, bertempur terus-menerus, dengan hati yang tak dapat dipatahkan oleh musuh, musuh ataupun maut.¹⁴⁴

Seperti Sang Anoman percaya, bahwa kodrat dan akalnya akan sanggup membinasakan dasamuka, demikianlah pula Sang Gerilya percaya, bahwa Gerpolek akan sanggup memperoleh kemenangan terakhir atas kapitalisme imperialisme.¹⁴⁵

E. Politik Ekonomi Internasional

Dalam beberapa hal penting, kehidupan kita adalah tentang ekonomi politik, untuk bertahan hidup, kita perlu makan. Sebagian besar dari kita mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dari pasar, membayarnya dengan uang yang kita peroleh. Kita tidak dapat membeli apapun tanpa uang, untuk mendapatkan barang-barang kita perlu sejumlah kekayaan sebagai kebalikan dari kemiskinan. Pasar modern didasarkan pada aturan-aturan politik (jika tidak, pasar tersebut akan menjadi pasar gelap yang berdasarkan pada ancaman, penyuapan dan kekuatan). Regulasi dan aturan politik menyatakan kerangka kerja yang

¹⁴⁴Tan Malaka, *Gerilya Politik Ekonomi (Gerpolek)*, (Yogyakarta: Jendela, 2000), hal. 21

¹⁴⁵Ibid, hal 23

dengannya pasar berfungsi. Pada saat bersamaan, kekuatan ekonomi merupakan basis bagi kekuatan politik. Jika ekonomi adalah tentang pencapaian kekayaan dan politik adalah tentang pencapaian kekuatan, keduanya berinteraksi dalam cara yang rumit dan memusingkan. Hal ini merupakan hubungan yang kompleks dalam konteks internasional antara politik dan ekonomi antara negara dan pasar yang merupakan inti dari ekonomi politik internasional.¹⁴⁶

Studi tentang ekonomi politik internasional merupakan studi yang termasuk baru muncul. Krisis *oil shock* tahun 1970an telah memunculkan kesadaran bahwa politik dan ekonomi saling mempengaruhi. Sebelum itu para akademisi ekonomi dan politik seringkali memisahkan keduanya. Para penstudi ekonomi percaya bahwa pasar terisolasi dari isu politik. Ekonomi politik internasional sendiri berusaha untuk mengemukakan bahwa sebenarnya ekonomi mempunyai keterikatan dengan power atau politik.

Negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi kepentingannya. Untuk mencapai hal tersebut negara dapat memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan power dan pengaruh. Terbentuknya rezim sebagai alat untuk mengatur pasar turut menciptakan terpenuhinya kebutuhan politik suatu negara. Ketika rezim dapat mempengaruhi distribusi pendapatan maka negara berusaha untuk mempengaruhi desain dan fungsi dari institusi, hal ini untuk memenuhi kebutuhan politik, ekonomi, dan kepentingan lain. Maka studi ekonomi politik internasional

¹⁴⁶Jackson Robert, dkk. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 231

mengasumsikan bahwa negara, MNC, dan aktor lainnya menggunakan power yang dimiliki untuk mempengaruhi *nature* dari rezim internasional.¹⁴⁷

Setelah negara menggunakan powernya untuk mempengaruhi rezim internasional seperti WTO dan GATT maka telah terjadi pula kepentingan politik yang berhubungan dengan ekonomi. Global Political Economy mengungkapkan bahwa ekonomi politik internasional merupakan dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi), yang terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya. Pengertian lain mengenai ekonomi politik internasional diungkapkan oleh John Ravenhill yang mendefinisikan ekonomi politik internasional sebagai “*field of enquiry*”, yaitu sebagai suatu subjek permasalahan yang fokus utamanya adalah hubungan (interrelationship) antara kekuasaan publik dan pribadi dalam persoalan pengalokasian sumberdaya yang terbatas atau langka.¹⁴⁸

Ekonomi politik internasional sendiri secara sederhana dapat diartikan menjadi dua kata yaitu *state* (negara) dan *market* (pasar). Ketika terjadi hubungan timbal balik diantara keduanya maka ekonomi dan politik keduanya saling mempengaruhi. Namun pada perkembangannya politik mempengaruhi ekonomi lebih dominan. Sebagai contoh adalah ketika kekuasaan membutuhkan ekonomi untuk memperkuat powernya. Terbentuknya rezim internasional adalah salah satu contoh nyata. Di satu sisi rezim internasional dibutuhkan untuk mempertahankan

¹⁴⁷Jackson Robert, dkk. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 240

¹⁴⁸<https://muhammadnurhadi.wordpress.com/2011/05/26/makalah-ekonomi-politik-domestik-dan-internasional/>, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 17 maret 2019 Jam 8:00 WIB

dan menstabilkan ekonomi internasional namun di lain sisi muncul kritik terhadap rezim internasional. Susan Strange mengkritik bahwa teori rezim berada pada passing fad, dan paling buruk merupakan legitimasi Amerika untuk melanjutkan dominasi pada ekonomi dunia.¹⁴⁹

Terlepas dari perdebatan mengenai rezim internasional tersebut kita kembali ke ekonomi politik internasional. Para akademisi rata rata akan setuju bahwa ekonomi politik internasional memiliki “*state of art*” didalamnya. Ekonomi politik internasional sebagai suatu studi yang termasuk baru memiliki keunikan dan nilai seni tersendiri. *State of the art* disini penulis artikan sebagai pemanfaatan teori ekonomi politik internasional yang dapat teraplikasikan secara nyata. Apakah studi ini mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang muncul. Dan dari pertanyaan ini maka dapat dikatakan ekonomi politik internasional mempunyai state of the art didalamnya.

Studi ekonomi politik internasional bagaimanapun juga telah menyadarkan banyak akademisi bahwa sebenarnya politik dan ekonomi keduanya sangat berkaitan. Dengan politik maka ekonomi dapat dikuasai. Disini penulis kembali mengambil dua kata kunci yang menekankan ekonomi politik internasional sebagai *state of the art*. Yaitu negara dan pasar. Ketika negara berusaha secara maksimal mengendalikan pasar untuk kepentingannya maka telah terjadi hubungan antara politik dan ekonomi.¹⁵⁰

¹⁴⁹Jackson Robert, dkk. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 247

¹⁵⁰ Ibid hlm.251

a) Teori-teori Politik Ekonomi Internasional

1) Merkantilisme

Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elit-elit politik yang berada pada garis depan pembangunan negara modern. Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada sebagai wilayah kerjasama dan saling menguntungkan. Persaingan ekonomi antar negara dapat mengambil dua bentuk yang berbeda. Pertama, merkantilisme bertahan atau ramah, adalah negara memelihara kepentingan ekonomi nasionalnya sebab hal tersebut merupakan unsur penting dalam keamanan nasionalnya. Kebijakan seperti itu tidak memiliki dampak negatif pada negara lain. Kedua, merkantilisme agresif atau jahat, yaitu negara-negara berupaya mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi.¹⁵¹

2) Liberalisme

Adam Smith, bapak Liberalisme ekonomi, yakin bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia. Ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran bahwa jika di biarkan sendiri perekonomian pasar akan berjalan spontan menurut mekanisme atau hukumnya sendiri. Hukum ini dipandang melekat dalam proses produksi ekonomi dan perdagangan. Kaum liberal berpendapat bahwa aliran modal, barang dan jasa yang bebas diantara negara-negara sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara

¹⁵¹ Frans Suseno Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm 23

global. Kaum ekonomi liberal menolak pandangan kaum merkantilis bahwa negara adalah aktor dan fokus sentral ketika menghadapi permasalahan ekonomi. Aktor sentral adalah individu sebagai konsumen dan sebagai produsen. Pasar adalah arena terbuka tempat para individu bersama-sama menukarkan barang dan jasa. Kaum liberal selanjutnya menolak pandangan "zero sum" kaum merkantilis, suatu pandangan bahwa keuntungan ekonomi suatu negara sebenarnya merupakan kerugian ekonomi negara lain. Kaum ekonom liberal terdahulu menyebut *Laissez faire* yaitu kebebasan pasar dari semua jenis pembatasan dan peraturan politik.¹⁵²

3) Marxisme

Teori Marxis dan teori Neo-Marxis dalam hubungan internasional menolak pandangan realis/liberal tentang konflik atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Marxisme membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain, sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital).¹⁵³

Kaum Marxis sepakat dengan kaum merkantilis bahwa politik dan ekonomi sangat berkaitan, keduanya menolak pandangan kaum liberal tentang bidang ekonomi yang berjalan dengan hukumnya sendiri. Tetapi, sementara kaum

¹⁵² Yunus Handoko, *Pemikiran Ekonomi Politik Taylor, Smith, Marx, dan Keynes*, vol 7 Agustus 2013. hlm 14

¹⁵³ Frans Suseno Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm 39

merkantilisme melihat ekonomi sebagai alat politik, kaum marxis menempatkan ekonomi yang pertama dan politik yang kedua. Bagi kaum marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan salah satu kelas, kaum borjuis, memiliki alat-alat produksi. Sedangkan kaum proletar hanya memiliki kekuatan kerjanya saja, yang harus di jual pada borjuis. Tetapi buruh lebih banyak bekerja di banding yang ia dapatkan kembali. Terdapat nilai tambah yang diambil kaum borjuis. Hal ini merupakan keuntungan kapitalis, dan keuntungan itu berasal dari eksploitasi tenaga kerja. Pandangan kaum Marxisme tersebut disebut “Materialisme”. Hal ini didasarkan pada pernyataan bahwa aktivitas inti dalam masyarakat manapun hirau dengan cara-cara bagaimana manusia menghasilkan alat-alat eksistensinya.¹⁵⁴

b) Pendekatan dalam Politik ekonomi Internasional

Berbeda dengan tradisi-tradisi pendekatan ekonomi politik internasional yang lama (merkantilisme, liberalism dan Marxisme), pendekatan yang baru lebih kepada perdebatan yang bentuknya secara metodologi, yaitu bagaimana sebuah kebijakan luar negeri bisa diambil secara rasional, bukan lagi ideology seperti sebelumnya, pendekatan yang baru lebih mampu untuk menjelaskan hubungan ekonomi politik.¹⁵⁵

1) Institutional

¹⁵⁴Frans Suseno Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm29

¹⁵⁵Jackson Robert, dkk. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm238.

Pendekatan ini lebih kepada arena ekonomi dunia yang berbentuk kerja sama antar Negara, pendekatan ini melihat aktor utama yaitu pemerintahan suatu Negara dan insititusi yang pemerintah gunakan sebagai bentuk untuk mencapai kepentingan mereka, dan kunci utama dan level rational choice oleh suatu pemerintahan berdasarkan keuntungan potensial yang bisa didapat dari kerja sama. Bagi institunionalis kunci utama untuk membentuk kondisi tatanan kerja sama adalah dengan adanya keberadaan insititusi internasional yang bisa menjamin kerja sama selalu berlanjut.¹⁵⁶

2) Political Economy

Bagi political economist, karakter ekonomi dunia adalah kompetisi diantara kepentingan utama/tetap antar negara dan aktor-aktor utama di tiap negara adalah grup-grup kepentingan yaitu yang memiliki kekuatan di ekonomi domestik, kunci utamanya adalah rational choice yang diambil dari respon ekonomi domestik yang mengubah ekonomi politik internasional. Para economist tidak terlalu peduli dengan teori yang mengenai kebutuhan-kebutuhan mendesak bagi tatanan internasional.¹⁵⁷

3) Neo-Gramscian

Neo-gramscian ekonomi dunia adalah sebuah struktur yang melingkupi pengetahuan, ide-ide dan institusi-institusi yang merefleksikan kepentingan utama negara-negara dan berkompetisi didalamnya. Ini terkait dengan struktur system itu sendiri sebagai bentuk vital dalam memahami

¹⁵⁶Jackson Robert, dkk. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm243

¹⁵⁷ Ibid, hlm246

identitas-identitas dan preferensi-preferensi setiap aktor, kunci utamanya adalah kompetisi, yang mana dibatasi oleh kebutuhan-kebutuhan Negara-negara kuat untuk memperoleh pengakuan dari Negara-negara lemah.¹⁵⁸



¹⁵⁸Jackson Robert,dkk. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm250

BAB IV

PEMIKIRAN POLITIK EKONOMI TAN MALAKA DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

A. Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka

Tan Malaka dalam melihat revolusi Indonesia tak jauh berbeda dengan para founding fathers lainnya seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan lain-lain. Ia melihat revolusi Indonesia tidak berhenti pada revolusi politik semata-mata namun melihatnya sebagai revolusi yang lebih global sifatnya, mulai dari revolusi penghapusan feodalisme, revolusi kemerdekaan dan revolusi sosial yang isinya harapan terhadap hadirnya masyarakat adil dan makmur. Untuk sebagian besar *founding fathers* kita, diartikan sebagai penolakan terhadap kapitalisme.¹⁵⁹

Di Indonesia hal demikian juga terjadi walaupun tidak selalu harus komunisme, dan juga banyak yang menganut sosialisme non radikal. Penolakan terhadap kapitalisme sebenarnya bukan hanya khas Tan Malaka, juga Bung Karno, Hatta, Sjahrir, bahkan sampai Tjokroaminoto harus menyatakan Islam itu juga sosialis (dalam bukunya *Islam dan Sosialisme*), ketika terjadi konflik antara Islam dan komunisme didalam tubuh Sarekat Islam. Mereka semua dan banyak lainnya juga mempunyai komitmen tersebut.¹⁶⁰

Baru setelah kemerdekaan 100% dapat di raih maka maximum program selanjutnya adalah menuju masyarakat sosialisme Indonesia, dan ini

¹⁵⁹ Fitri R. Ghazally, *20 Tokoh Nasional Abad 20*, (Jakarta: Penerbit Progress, 2004), hal 60

¹⁶⁰ Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal. 225

harus diupayakan. Hanya saja Tan Malaka mengakui dalam iklim revolusi fisik yang sedang berlangsung ini, tidaklah arif kalau kita mengedepankan maximum program itu. Penekanan menghadapi kembalinya penjajahan Belanda, juga terasapada kebijakan politik partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA). Hal ini sudah pasti sepengetahuan Tan Malaka sebagai tokoh belakang layar, yang selalu mempengaruhi kebijakan politik partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA) pada masa-masa awal berdirinya.¹⁶¹

Inilah sikap nasionalnya yang lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam bangsa yang sedang membutuhkan ini. Dalam suasana revolusi nasional yang genting memang nampaknya Tan Malaka menyadari, mengedepankan maximum program dibandingkan minimum program adalah hal yang rumit, membutuhkan perjuangan dan tidak menutup kemungkinan akan adanya polemik yang akhirnya memecahkan persatuan bangsa yang baru saja merdeka. Dalam penerapannya pun selanjutnya Tan Malaka mengatakan untuk tetap memperhatikan kondisi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang ditanyakan olehnya “sosialisme 100% bisa dijalankan, adalah tergantung kekuatan lahir batin bangsa Indonesia”.¹⁶²

Sosialisme adalah berbagai teori ekonomi dan politik yang memperjuangkan pemilikan dan pengelolaan kolektif atau pemerintah atas alat-alat produksi dan distribusi barang. Prinsipnya, setiap warga masyarakat wajib bekerja dan mendapatkan upah sesuai prestasi kerjanya. Sistem sosialis

¹⁶¹Tan Malaka, *Dari Penjara Kepingjara II*, (Yogyakarta: Pustaka Murba, 2000) hal.33

¹⁶²Wasid Suwanto, *Mewarisi Gagasan Tan Malaka*, (Jakarta: LPPM, 2006) hal. 123

jugamerupakan sistem masyarakat atau kelompok hidup bersama tanpa hak milikpribadi atau swasta. Semuanya dikelola dari, oleh, dan untk semua (bersama).¹⁶³Kondisi ini memungkinkan alat-alat produksi dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnyaSemua kebutuhan warga negara diinventarisasi, mulai dari lahir sampaimeninggal. Lalu dibuat rencana pembangunan semesta berkala berjangka pendek,menengah, dan panjang yang secara bertahap akan memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁶⁴

Menurut Tan MalakaSosialisme dengan hakekat dan substansi yang sama memiliki bermacamvariasi. Variasi tersebut bergantung dari asal kelahirannya. Namun, semuanya merupakan antitesis terhadap kapitalisme. Ada sosialisme Marx-Engels, adasosialisme agama dan ada sosialisme idealis.¹⁶⁵Di Indonesia semua itu tercakup dalam kebhinneka tunggal ikaanPancasila dan UUD 1945 pasal 33, perbedaan dari berbagai variasi sosialisme ituterletak pada strategi, taktik, metodologi, titik-tolak cara berfikir, filsafat, danideology masing-masing.¹⁶⁶

Tan Malaka mengatakan: “Sejarah masyarakat manusia diseluruh duniasekarang sedang menuju masyarakat komunis”. Sebelumnya, didalam masyarakatkapitalis terjadi pertentangan diantara kerja bersama oleh yang tak mempunyamelawan milik perseorangan yang perpunya. Kita sedang menuju kepadamasyarakat komunisme modern yang (seperti masyarakat sosialisme)

¹⁶³ Tan Malaka, *Dari Penjara Kepingjara II*, (Yogyakarta: Pustaka Murba, 2000)hal..22

¹⁶⁴ Ibid. hal 27

¹⁶⁵ Tan Malaka, *Pandangan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Wijaya,1952)hal.43

¹⁶⁶ Wasid Suwanto, *Mewarisi Gagasan Tan malaka*,(Jakarta: LPPM, 2006) hal.98

berdasarkan kerja bersama dan milik bersama atas alat dan hasil produksi.³¹ Inilah revolusi sosial yang di idam-idamkan oleh Tan Malaka dalam usaha memakmurkan Indonesia.¹⁶⁷

Dalam penerapannya pun, Tan Malaka mengatakan untuk tetap memperhatikan kondisi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang dinyatakan olehnya; “sosialisme 100% bisa dijalankan, adalah tergantung kekuatan lahir batin bangsa Indonesia sendiri dan keadaan disekitar Indonesia”. Tentang bentuk perekonomian yang bagaimana ditawarkan Tan Malaka pada rakyat Indonesia, Tan Malaka tampaknya yakin bahwa ekonomi sosialislah yang menjadi idaman rakyat Indonesia dikemudian hari. Menurut keyakinannya, pengelompokan politik yang ada di Indonesia, seperti Islam yang mewakili kaum tani, nasionalis yang mewakili kaum borjuisi tengah serta sosialis yang mewakili kaum proletar, yang pada saat memperjuangkan kemerdekaan bahu membahu mengusir kolonialisme Belanda, namun setelah kemerdekaan tercapai bisa saja mengalami polarisasi, dan konflik satu sama lainnya pun timbul.¹⁶⁸

Dalam upaya membangun perekonomian Indonesia, di dalam brosur “Rentjana Ekonomi” yang ditulisnya tahun 1945, Tan Malaka menawarkan sebuah konsep rencana ekonomi untuk diterapkan dalam konteks negara Indonesia. Ekonomi sosialis menurutnya adalah rencana ekonomi yang dapat menolong rakyat Murba Indonesia keluar dari cengkaman kapitalisme

¹⁶⁷ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara*, (Yogyakarta: Pustaka Murba, 2000) hal. 73

¹⁶⁸ Tan Malaka, *Muslihat Politik, Rentjana Ekonomi Berjuang*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987) hal 34

yang telah menyengsarakan bangsanya selama berabad-abad, dan ini segera dilenyapkan dari Indonesia. Kapitalisme dalam pertumbuhannya hanya akan terakumulasi pada kaum kapitalis yang jumlahnya sedikit, dan sebagian besar lainnya yaitu rakyat murba hanya akan menikmati sebagian terkecil dari jumlah modal tadi. Surplus values (nilai lebih) yang dikemukakan oleh Marx menurutnya adalah perampokan yang dilakukan oleh kapitalis terhadap hak rakyat Murba. ¹⁶⁹ Inilah kritik terhadap perekonomian dunia yang berdasarkan kapitalisme, demokrasi dan fasisme. Tidak akan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia ¹⁷⁰

Tan Malaka menganggap bahwa kapitalisme suatu saat akan mengalami krisis. Ini dinyatakan dengan apabila seluruh kekuatan kapitalis yang ada, dalam usahanya meraih keuntungan yang besar maka berlomba-lomba untuk memproduksi barang dalam jumlah banyak. Si kapitalis A, kapitalis B, kapitalis C dan yang lain-lainnya, memproduksi barang dalam jumlah yang besar, pada waktu yang bersamaan melebihi jumlah permintaan, ini sesuai dengan hukum ekonomi yang menyatakan bahwa permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) haruslah seimbang. Kalau penawaran (*supply*) melebihi jumlah permintaan (*demand*) maka yang terjadi adalah over produksi. Sebagai akibatnya maka barang melimpah dan bertumpuk di gudang-gudang, harga pun turun dan untung merosot. Pabrik terpaksa tutup sebab tidak menguntungkan lagi

¹⁶⁹ Tan Malaka, *Muslihat Politik, Rencana Ekonomi Berjuang*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987) hal. 39

¹⁷⁰ Wasid Suwanto, *Mewarisi Gagasan Tan Malaka*, (Jakarta: LPPM, 2006) hal.

dan pengangguran memuncak. Para pedagang juga berhenti berdagang, dan para bankir pun menuntut piutang. Apabila ini terjadi maka krisis dalam kapitalisme pun akan terjadi, yang pada gilirannya akan membawanya kepada kehancuran. Dalam kondisi inilah Tan Malaka menamakannya produksi *anarchistis*, inilah yang menjadi biang keladi krisis tersebut.¹⁷¹

Dalam perekonomian liberal klasik sebagaimana yang ditunjukkan Tan Malaka dengan merujuk kepada pendapat Marx, setiap individu merdeka untuk berproduksi sesukanya, menurut kaum kapitalis, maka hasrat mencari untung (*profit motive*) adalah hak setiap individu, dan ini diperkuat dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa pertama, kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalisme digerakkan dan dikoordinasi oleh pasar (bebas) dengan instrument harga sebagai penanda (sinyal).¹⁷²

Namun menurut Tan Malaka sistem kapitalisme hanya akan menyebabkan siapa kuat secara modal maka itulah yang akan bertahan. Yang kedua, sistem itu akan memberikan pendapatan baru dan yang ketiga sistem ini pada akhirnya semakin mengekalkan perbedaan yang mencolok antara kelas bourgeois dan kelas proletar. Pembagian hasil produksi yang tidak sama dimana buruh hanya mendapatkan upah yang kecil, pada akhirnya membuat kondisi buruh tidak akan pernah menjadi lebih baik dan hidup terus dalam serba kekurangan. Dalam suasana masyarakat yang seperti ini, di mana masyarakat

¹⁷¹Tan Malaka, *Muslihat Politik, Renjana Ekonomi Berjuang*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987) hal 56

¹⁷²Ibid, hal 60

terbelah dua antara kelas bourjuasi dan kelasproletar maka barang yang banyak dihasilkan menjadi over produksi.¹⁷³

Kelas bourjuasi tidak habis mengkonsumsi, sementara kelas proletar tidak mempunyai kemampuan membeli. Sebagai puncak dari produksi anarchistis itu adalah persaingan hebat antara satu kapitalis dengan kapitalis lain dalam satu negara, dan selanjutnya persaingan antara satu negara kapitalis dengan negarakapitalis yang lainnya. Tiap-tiap negara kapitalis berlomba-lomba menanamkan modal di negara yang lemah atau negara dunia ketiga, lalu memonopoli hasil buminya untuk perindustrian negara kapitalis tersebut. Perlombaan ini akhirnya memunculkan imperialisme dan perang imperialisme antara satu negara kapitalis dengan negara kapitalis lainnya, untuk memperebutkan tanah jajahan. Dan produksi *anarchistis* ini berakhir pada peperangan imperialisme.¹⁷⁴

Kalau dalam pendapat Marx produksi yang over tadi sebagai penyebab krisis, maka kelebihan produksinya di ekspor ke negara-negara terjajah tadi sebagai pangsa pasar baru. Siklus penindasannya pun berubah, tidak lagi seperti apa yang ada dalam kapitalisme klasik melalui penindasan majikan terhadap buruh dan pabrik. Namun dia berkembang melalui penindasan negara kapitalis terhadap negara terjajah atau negara dunia ketiga.¹⁷⁵

¹⁷³Tan Malaka, *Muslihat Politik, Renjana Ekonomi Berjuang*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987) hal 65

¹⁷⁴Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal. 232

¹⁷⁵Karl Marx, *Sosialisme dan Kapitalisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) hal 72

B. Rencana Ekonomi Tan Malaka

Rencana ekonomi menurut Tan Malaka adalah usaha untuk mengatur produksi dan distribusi agar terencana. Rencana ekonomi ini sudah dijalankan dinegara-negara komunis seperti Uni Sovyet, kemudian di negara-negara facisseperti Jerman, Italia dan di negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ekonomi Anarchis itu dicoba ditukar dengan ekonomi teratur, ialah dengan New Deal nya Roosevelt. Berhubung pemusatan kekuasaan untuk mengatur ekonomi di negara-negara demokratis dan tidak demokratis selanjutnya berlainan, maka pemusatan kekuasaan untuk mengatur ekonomi pun berlainan pula derajatnya. Di Amerika dan negara-negara fasis hak milik tetap diakui, sedangkan dinegara komunis hak milik dikelola oleh negara.¹⁷⁶

Sedangkan adanya undang-undang yang mengatur hak dan kekuasaan adalah cirri dari sebuah negara demokrasi. Tan Malaka mengatakan hak dan kekuasaan tersebut dibagi-bagi kedalam: pertama, antara rakyat dan pemerintah. Kedua, pemisahan kekuasaan dalam tiga badan yang terpisah yang lebih dikenal dengan Trias Politika. Asumsi dasarnya adalah pemisahan badan tersebut berguna untuk mencegah terjadinya praktek-praktek otoriter, di mana kekuasaan terpusat pada satu tangan saja.¹⁷⁷

kemudian Tan Malaka beranjak kepada sistem perekonomian sosialis, yang ditawarkannya untuk menjadi sistem perekonomian yang dapat dipakai oleh bangsa Indonesia. Namun sebelum jauh melangkah Tan Malaka kembali

¹⁷⁶ Tan Malaka, *Muslihat Politik, Renjana Ekonomi Berjuang*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987) hal 7

¹⁷⁷ Ibid. hal 11

mengingat apa yang dimaksud dengan rencana ekonomi tersebut sebagai dasar dari sosialisme. Menurutnyaperekonomian tersebut harus diatur secara terencana tidak anrchi seperti dalam kapitalisme. Produksi harus diseimbangkan dengan pemakaian. Dengan demikian krisis dapat dihindarkan, sedangkan dasarnya menurut Tan Malaka adalah persamaan sosial dan tolong menolong yang merupakan fondasi dari sosialisme.¹⁷⁸

Untuk lebih spesifikasinya Tan Malaka menyatakan jumlah keseluruhan produksi yang ada setelah dinominalkan haruslah sesuai dengan jumlah keseluruhan gaji warga negara. Makin tinggi gaji makin bisa ditinggikan jumlah produksi, makin rendah gaji makin susah untuk menaikkan jumlah produksi. Kemudian rencana kedua yang harus di ingat adalah, sebelum kita menguasai industri menengah, sulitlah bagi kita untuk masuk kedalam industrialisasi berat. Artinya, sebelum kita melangkah maju ke arah negara industry besar yang mampu memproduksi mesin-mesin berat, kita haruslah mampu menguasai industry menengah dan ringan. Setelah itu terjadi, baru rencana selanjutnya adalah merencanakan untuk menukar negara pertanian menjadi negara industry.¹⁷⁹ Namundiingat juga oleh Tan Malaka, untuk menaksir jumlah produksi agar sama dengan gaji maka perlu direncanakan beberapa hal, yaitu:

- 1) Industri
- 2) Mesin

¹⁷⁸Tan Malaka, *Muslihat Politik, Renjana Ekonomi Berjuang*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987) hal 14

¹⁷⁹Ibid, hal. 23

3) Gaji

4) Barang-barang import dan ekspor

Industri dan mesin ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemudian selanjutnya Tan Malaka menyatakan keduanya tersebut haruslah dicocokkan dengan gaji sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan import kita butuhkan untuk menutupi kekurangan hasil produksi dalam negeri untuk beberapa jenis barang. Kemudian ekspor juga kita lakukan untuk menutupi kelebihan beberapa komoditi barang, yang tentunya hasil import dan ekspor sebisa mungkin juga harus seimbang. Setelah itu semua diteliti, kemudian dengan simplistik Tan Malaka mengarahkan pembicaraan pada masalah pembagian pendapatan negara yang diwujudkan dalam bentuk pembagian gaji. Menurutnya pembagian gaji dapat dikategorikan dalam dua macam, yang pertama dalam tahap sosialisme yang sudah mencapai tingkat komunisme. Dan yang kedua adalah tahap sosialisme itu sendiri. Dalam tahap komunisme yang merupakan tahap ideal menurut Tan Malaka “tiap-tiap orang bekerja menurut kemampuannya dan mengambil hasil secukupnya”. Sedangkan dalam tahap sosialisme berlaku sistem penggajian menurut kepandaian masing-masing, namun disamping itu juga ada tunjangan sosial yang diberikan kepada masing-masing keluarga, yang terakhir ini dibagi rata untuk orang dewasa dan anak-anak. Hal demikian menurut Tan Malaka cocok untuk periode pertengahan dan bersifat kompromis, yang merupakan jalan tengah antara fase kapitalis dengan fase komunis. Disatu sisi masih terdapat sistem

penggajian menurut kemampuan dan kecakapan seseorang, namun disini yang lain juga memberikan tunjangan sosial yang merata pada semua orang.¹⁸⁰

Untuk mempermudah pembaca dalam menegrti uraian tersebut, maka TanMalaka mencontohkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalnya dalam satu negara terdapat 25.000.000 keluarga, sedangkanpendapatan negara pertahun Rp. 4.500.000,-

Maka:

| | |
|---|----------------------|
| Misalkan tunjangan sosial sebesar | Rp. 2.000.000.000,- |
| Misalkan uang untuk pemeliharaan mesin pertahun | Rp. 500.000.000,- |
| Misalkan uang bank dan sewa dihapuskan | Rp. 0,- |
| Kapitalis juga dihapus | Rp. 0,-+_____ |
| Jumlah | Rp. 2.500.000.000,- |
| Kemudian sisa untuk gaji | Rp. 2.000.000.000,-+ |
| Jumlah | Rp. 4.500.000.000,- |

Sisa yang Rp. 2.000.000.000,- itulah nanti yang menurut Tan Malaka akandibagikan kepada 25 juta orang pekerja menurut kecakapan dankemampuannya.¹⁸¹

Kemudian Tan Malaka melanjutkan pada tingkat keluarga, setiap keluargamendapatkan:

Ibu dan Bapak umpamanya mendapatkan 2 x Rp. 4,00,-
(seminggu) = Rp. 8,00,-

¹⁸⁰ Tan Malaka, *Muslihat Politik, Renjana Ekonomi Berjuang*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987) hal.33

¹⁸¹ Ibid, hal.37

Anaknya 2 orang mendapatkan

2 x Rp. 4,00,-(seminggu) = Rp. 8,00,-

Bapak bekerja dengan gaji

Rp. 4,00,-(seminggu) = Rp. 4,00,-+

Jumlah = Rp. 20,00,-

Dalam satu bulan maka setiap keluarga akan mendapatkan Rp.80,00,-

.Jumlah yang akan diberikan pada setiap keluarga seperti yang telah diingatkanoleh Tan Malaka tentunya amat tergantung kepada besarnya pendapatan sebuahnegara, jumlah penduduk, tingkat kebutuhan hidup dan lain sebagainya.¹⁸²

C. Relevansi Pemikiran Poliik Ekonomi Tan Malaka di Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia yang diterapkan saat ini adalahSistem Perekonomian Pancasila, atau disebut juga dengan Sistem Ekonomi Demokrasi. Artinya, landasan sistem ekonomi di Indonesia secara normatif adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Landasan ekonomi Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 yang isinya:

1. Ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Ayat 2Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

¹⁸² Tan Malaka, *Muslihat Politik, Renjana Ekonomi Berjuang*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987) hal41

3. Ayat 3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Ayat 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Walaupun sistem perekonomian di Indonesia sudah jelas dirumuskan dalam UUD 1945 ayat 33 namun dalam prakteknya dalam kondisi perekonomian hari ini justru Indonesia mempraktekkan sistem ekonomi kapitalis, yang meliberalisasikan modal-modal asing yang sangat bertentangan dengan landasan sistem ekonomi Indonesia. Dalam pergolakan politik dan ekonomi Indonesia hari ini tentunya jelas bahwa ketergantungan Indonesia terhadap Negara asing masih kuat, sehinggamudah di monopoli oleh Negara asing yang mempunyai kepentingan di Indonesia. Monopoli yang di mainkan adalah ideology neo liberalism dan konsep demokrasi yang saat ini masih berkembang dalam hasanah pengetahuan.¹⁸³

maka revolusi Indonesia merupakan revolusi masalah politik dan ekonomi tak bisa lagi di pisah-pisahkan. Perang kemerdekaan rakyat Indonesia berarti kemerdekaan politik dan perjuangan jaminan ekonomi. Kemerdekaan nasional yang serentak berarti menjamin keadaan ekonomi dan sosial. Hasrat

¹⁸³Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal 101

perangkemerdekaan Indonesia tidak saja untuk melenyapkan penindasan danmendapatkan jaminan hidup dalam masyarakat baru yang di perjuangkan.¹⁸⁴

Tan Malaka dalam buku gerpoleknya menganggap bahwa revolusiIndonesia, bukanlah revolusi nasional semata, seperti diciptakan oleh segelintirorang Indonesia untuk kepentingan diri sendiri dan siap menyerahkan semuasumber pencahariannya untuk kolonial.¹⁸⁵

Kalau kekuasaan politik 100% disertai juga dengan 60% kekuasaan atasekonomi modern di tangan murba Indonesia barulah revolusi nasional itu adaartinya. Barulah ada jaminan hidup bagi murba Indonesia. Barulah kaum murbaakan giat bertindak menghadapi musuh dan mengorbankan jiwa raganya untukmenciptakan masyarakat baru bagi diri dan keturunannya.¹⁸⁶

Apabila para wakil rakyat dipilih oleh rakyat Indonesia sendiri lewatpemilihan yang demokratis (umum, langsung, dan rahasia); apabila para wakilrakyat yang sesungguhnya itu memegang pemerintahan Indonesia, di sampingsekitar 60% perkebunan, pabrik, tambang, transportasi dan bank modern, beradaditangan rakyat Indonesia, barulah revolusi nasional itu ada artinya dan adajaminannya bagi murba Indonesia.¹⁸⁷

Tetapi jika pemerintahan Indonesia kembali dipegang oleh kaki tangankapitalis asing, walaupun kaki tangan itu adalah bangsa Indonesia sendiri,

¹⁸⁴Ibid,hal30

¹⁸⁵ Ibid, hal34

¹⁸⁶Tan Malaka, *Toendok Kepada Kekoeasaan, Tetapi Tidak Toendok Kepada Kebenaran*,(Jakarta: Yayasan Massa, 1985)hal.20

¹⁸⁷ Tan Malaka, *Gerilya Politik Ekonomi (Gerpolek)*, (Yogyakarta: Pustaka Jendela, 2000),hal80

dan 100% perusahaan modern berada di tangan kapitalis asing, seperti di jaman Hindia Belanda, maka revolusi nasional itu berarti membatalkan proklamasi dan kemerdekaan nasional dan mengembalikan kapitalisme dan imperialisme internasional.¹⁸⁸

Relevansi dari pemikiran Tan Malaka cukup jelas jika di kaitkan dengan konsep politik ekonomi hari ini, yaitu menolak kapitalisme di Indonesia. Sikap ini dibangun oleh Tan Malaka mulai dari pra kemerdekaan Indonesia yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan kemerdekaan yang mutlak untuk bangsa Indonesia dan sesuai dengan hukum internasional. Dengan begitu Indonesia mempunyai hak untuk mengambil kembali alat produksi yang telah dirampas bangsa asing dan memberikan alat produksi tersebut kepada rakyat Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA).¹⁸⁹

Salah satu term kapitalisme diatas mengatakan bahwa mendorong investasi asing, ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sudah masuk kedalam liberalisasi ekonomi tersebut. Artinya disini masyarakat bukan lagi sebagai subyek akan tetapi obyek dari kebijakan ekonomi. Dampak dari itu semua adalah budaya konsumeris dan peran pemodal yang dominan. Hal ini akan membentuk kelas menurut Marx dalam teori kapitalismenya. Sehingga rakyat yang tidak mempunyai modal harus rela menjadi bawahan atau buruh dari

¹⁸⁸ Ibid. hal. 84

¹⁸⁹ Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal 194

pemilik modal.¹⁹⁰Pada prinsipnya Tan Malaka ingin melepaskan diri dari intervensi asing, baik itu secara politik maupun ekonomi.

Tan Malaka melihat revolusi nasional adalah sebuah revolusi yang melawan imperialisme, kapitalisme. Dalam pengertian ini dapatlah dikatakan bahwa revolusi nasional Indonesia adalah reaksi dari imperialisme sebagai tahap tertinggi dari era kapitalisme. Dalam pandangan Historical Materialism dengan memakai analisa dialektika, Marx menyatakan bahwa perubahan masyarakat terjadi melalui perubahan sistem produksi.¹⁹¹



¹⁹⁰ Karl Marx, *Sosialisme dan Kapitalisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) hal 42

¹⁹¹ Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal 132

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tan Malaka melihat revolusi Indonesia tidak berhenti pada revolusi politik semata-mata, namun melihatnya sebagai revolusi yang lebih global sifatnya, mulai dari revolusi menghapuskan feodalisme, revolusi kemerdekaan dan revolusi sosial. Tentang revolusi sosial yang isinya harapan terhadap hadirnya masyarakat yang adil dan makmur untuk sebagian besar funding father diartikan sebagai penolakan terhadap kapitalisme. Dalam konsep mensejahterakan rakyat Indonesia Tan Malaka menginginkan kemerdekaan Indonesia 100%, artinya kemerdekaan Indonesia benar-benar diakui oleh Negara internasional dan intervensi asing benar-benar tiada di bumi Indonesia ini. Seperti alat produksi yang dirampas oleh penjajah itu dikembalikan lagi dan rakyat Indonesia yang akan membangun kembali alat-alat produksi yang telah dirampasnya. Alat produksi disini ialah perkebunan, tambang, dan kekayaan alam lainnya. Dalam pandangan politiknya Tan Malaka menginginkan Indonesia menganut ideology sosialisme dari pada kapitalisme, karena Tan Malaka menganggap sosialisme lah yang pas dengan kondisi kultur dan pemikiran rakyat Indonesia. Sedangkan kapitalisme menurut Tan Malaka di anggap sebagai monopoli barat terhadap negara dunia ketiga yang dalam hal ini adalah Indonesia.

Secara konseptual sistem ekonomi Indonesia adalah kerakyatan (Pancasila), dalam prakteknya mempunyai kecenderungan ke arah sistem

ekonomi kapitalistik yang meliberalisasikan seluruh sumber daya ekonomi yang ada. Pada orde reformasi ini, kepentingan pasar sangat dominan atas segala arah kebijakan dan ukuran keberhasilannya sehingga masyarakat sebagai subyek dalam hal ini dijadikan obyek ekonomi belaka. Dalam sistem ekonomi, Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis, dimana rakyat yang menjadi obyek dari kebebasan ekonomi. Rakyat adalah obyek dari ekonomi global, market pasar ditentukan oleh tingginya konsumen, konsumen disini adalah rakyat. Sedangkan pemerintah tidak ikut campur dalam kebijakan ekonomi. Ini yang disebut dengan kapitalisme di negara demokratis kata Tan Malaka. Tan Malaka dalam konsep ekonomi politiknya menolak kapitalis di Indonesia, sikap ini ditunjukkan Tan Malaka dalam setiap karya-karyanya, Tan Malaka teguh pada pendiriannya yang berujung pada gerakan antiterhadap bentuk imperialisme dan kapitalis di Indonesia. Sikap ini bertolak belakang dengan konteks ekonomi politik Indonesia hari ini, dimana liberalisasi ekonomi sedang berlangsung. Serta adopsi pemikiran barat yang secara langsung di adopsi oleh Indonesia. Ini menjadi kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia, dan mengagungkan pemilik modal dan investor asing yang semakin besar setiap tahunnya. Korban dari kebijakan ini menurut konsep Tan Malaka adalah rakyat Indonesia, dimana notabene masyarakat Indonesia masih lemah dalam sector pengetahuan dan ekonomi. Sehingga terbentuklah strata social di tengah masyarakat. Strata sosial itu disebut oleh Marx adalah bourjuasi sebagai kaum pemodal dan proletar sebagai kaum buruh.

B. Saran

Dengan sistem demokrasi yang hari ini sedang berlangsung mestinya Indonesia dalam sistem ekonominya menganut ekonomi kerakyatan, hal ini diperlukan untuk membangun ekonomi mikro yang kuat di setiap lapisan masyarakat, tujuannya tidak lain adalah kemandirian ekonomi untuk mencapai ekonomi makro. Ekonomi kerakyatan seperti diatas gunanya tidak lain adalah mengurangi tingkat ekspor impor, karena melihat potensi alam di Indonesia begitu besar. Namun yang menjadi catatan adalah sumber daya manusia yang lemah, ini bisa di antisipasi dengan program pemerintah terhadap pendidikan wajib kepada setiap masyarakat. Kebijakan ini bukan hal yang mustahil sebenarnya karena dalam UUD 1945 sudah di atur. Bahwasanya Negara mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa.

Politik dan ekonomi adalah sebuah sistem dalam Negara yang saling ketergantungan, kebijakan politik akan mempengaruhi pada APBN, sebaliknya seperti itu kebijakan ekonomi akan mempengaruhi pada kebijakan politik. Mengacu pada ekonomi kerakyatan diatas mestinya kebijakan politik yang harus dilakukan adalah memperkuat lembaga ekonomi, seperti koperasi. Selain itu partai politik disini harus lebih selektif untuk memilih calon legislatif, karena dengan begitu daya tawar lembaga politik di Indonesiasemakin kuat dan besar, sehingga bisa dianggap mampu menjalani roda pemerintahan dengan baik. Ini juga akan menekan tingkat korupsi yang

hari ini semakin besar. Eksekutif, legislatif dan yudikatif ini adalah sebuah lembaga yang mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Upaya untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih maka sistem pemilihan harus lebih selektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani dkk, *Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan*, (Jakarta: Restu Agung, 2001)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Ahmad Izzan, Syahril Tanjung, *Refrensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Quran Yang Berdimensi Islam*. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2006)
- Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Media Dakwah, 1984)
- David Smith, *Das Kaital Untuk Pemula*, (Jakarta: INSISTPerss, 2004)
- Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: cet 3, Balai Pustaka,1990)
- Deirde Wilson, *Teori Relevansi, Komunikasi dan Kognisi* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2009)
- Fitri R. Ghozally, *20 Tokoh Nasional Abad 20*, (Jakarta: Penerbit Progress, 2004),
- Emil Salim, *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Lembaga Ekononomi dan Kemasyarakatan Nasional, 1965)
- Harry A Poeze, *Tan Malaka Gerakan kiri, dan Revolusi Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000)
- Harry A Poeze, *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik 1927-1997*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000)
- Hary Prabowo, *Perspektif Marxisme Tan Malaka, Teori dan Praktis Menuju Republik*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2000)
- Harsojo, *Pengantar Antropologi Penelitian*, (Bandung: Bina Cipta, 1967)
- Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Imam Asyari Supari. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional.1981)
- Iqbal Hasan M, *Pokok-pokok metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (bogor, Ghalia Indonesia,2002)
- Irham Fahmi, *pengantar politik ekonomi*,(Jakarta: Nuansa Madani, 2000)
- Ismail, *Ekonomi Politik: Sebuah Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Pustaka Baca 2001)
- KartodirjoA. Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)

- Karl Marx, *Sosialisme dan Kapitalisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Magnis, Suseno Frans, *Pemikiran Karl Marx*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djilid 2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1958)
-, *Ekonomi Terpimpin*, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1968)
-, *Daulat Rakyat Dan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Tintamas, 1979)
- Mubiyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980)
-, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998)
- Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada)
- Rambe, Safrizal, *Pemikiran Politik Tan Malaka, Kajian Terhadap Perjuangan “Sang Kiri Nasionalis” Jalan Penghubung Memahami Madilog, Cet. I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003)
- Revrison Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Rudolf Mrazeek, *Semesta Tan Malaka*, (Yogyakarta: Biografi Publishin, 1994)
- Sarbini Sumawinata, *politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Syafarudin Usman dan Isnawati, *Neoliberalisme Mengguncang Indonesia* (Jakarta: Pustaka Narasi, 2009)
- Siti Ansyorih, *Negara dan Konstitusi*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008
- Sjahrir, *Formasi Mikro-Makro Ekonomi Indonesia*, (jakarta: UI Press, 1995)
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Bandung :Angkasa, 1965)
- Subiakto Tjakrawerdaja dkk, *Sistem Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Suroso, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Susilo Adi Taufiq, *Tan Malaka Biaografi Singkat 1897-1949”* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)
- Surahmad Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998)
- Swasono ,Sri Edi, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI-press.1985)
- Tan malaka, *Naar Dee Republik*, (Jakarta: Yayasan Massa 1925)

-, *Pandangan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1952)
-, *Dari Penjara Ke Penjara Bagian II*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1981)
-, *Toendok Kepada Kekoeasaan, Tetapi Tidak Toendok Kepada Kebenaran*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1985)
-, *Rentjana Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Massa 1987)
-, *SI Semarang dan Onderwijs*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987)
-, *Dari Penjara Kopenjara, Jilid I*, (Jakarta: Teplok Perss 1989)
-, *Gerilya Politik Ekonomi (Geporlek)*, (Yogyakarta: Pustaka Jendela, 2000)
-, *Aksi Massa*, (Jakarta: Teplok Press, 2000)
-, *Muslihat Politik, Renjana Ekonomi Berjuang*, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987)
-, *Manifesto PARI*, (Jakarta: Penerbit Wijaya, 2000)
- Tara Azwir Dainy, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2000)
- Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Wahid, Hasyim, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, (Yogyakarta: LKSi, 1999)
- Wasid Suwanto, *Memperkenalkan Tan Malaka Pahlawan Kemerdekaan Nasional Yang Paling tidak dikenal Dalam Madilog*, (Jakarta: Pustaka Data Indikator, 1999)
- Wasid Suwanto, *Mewarisi Gagasan Tan Malaka*, (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2006)
- Yustika, Ahmad Erani, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Dr.Ir. Arif Budi Manta, *Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita*, Vol3, 2000
- Emil Salim, *Ekonomi Pancasila*, Kompas 30 juni 1966
- Ismah Tita Ruslin, *Relasi Politik-Ekonomi Dalam Perspektif Dependencia*, Vol7, No2, 2012
- Keputusan Presiden NO. 53 Tahun 1963 yang menyatakan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional, Pidato Presiden Soekarno
- Rustam Efendi, *Konsep koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Vol15, 2018
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (Surabaya: rona publishing 2016)

Yunus Handoko, *Pemikiran Ekonomi Politik Taylor, Smith, Marx, dan Keynes*, Vol.7
Agustus 2013

